



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TRIWULAN II 2024



**Direktorat Konservasi Ekosistem
dan Biota Perairan**
**Direktorat Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut**



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, hingga Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dicapai selama satu tahun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menuju *good governance*.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberi sumbangsih dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini.

Semoga Laporan Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2024 ini, selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan program konservasi ke depan.

Jakarta, 16 Juli 2024

Direktur Konservasi dan Keanekaragaman
Hayati Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Firdaus Agung

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengelolaan Kinerja Pengelolaan kinerja di Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan Kinerja Organisasi di Kementerian dilakukan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran setiap level organisasi ke dalam dokumen kinerja organisasi. Secara garis besar, pengelolaan kinerja tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan II Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan tahun 2024 merupakan salah satu wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta dapat menjadi media yang menggambarkan capaian kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan khususnya selama Triwulan II tahun 2024 kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Indikator kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan tahun 2024 antara lain :

1. Nilai PNBP Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (Rp.000)
2. Luas Kawasan Konservasi Baru yang dicadangkan (Ribu Ha)
3. Luas Kawasan Konservasi yang Ditetapkan (Juta Ha)
4. Luas Kawasan Konservasi yang Operasional (Juta Ha)
5. Luas Kawasan Konservasi yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan (Juta Ha)
6. Rekomendasi Konvensi Internasional yang Disepakati dan Ditindaklanjuti (Dokumen)
7. Kesepakatan Jejaring, Kemitraan, dan Kerjasama Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan yang Disepakati (Kesepakatan)
8. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diverifikasi (Kelompok)
9. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau Dilindungi dan/atau Dilestarikan yang Meningkatkan Pengelolaannya (Jenis)
10. Jenis Keanekaragaman Hayati yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang Dikelola Pemanfaatannya secara Berkelanjutan (Jenis)
11. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati (%)
12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati (Indeks)
13. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati (Nilai)
14. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati (Dokumen)
15. Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)
16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

17. Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati (%)
18. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (nilai)

Adapun capaian kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat Konservasi dan Biota Perairan pada Triwulan II tahun 2024 yaitu:

- 1) IKU 06 Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diverifikasi (17 Kelompok);
- 2) IKM 11 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati (27,30%);
- 3) IKM 12 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (86,79);
- 4) IKM 14 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (2 Dokumen);
- 5) IKM 15 Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (100%);
- 6) IKM 16 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (100%).

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Dasar Hukum	2
1.3 Tantangan Strategis Organisasi.....	4
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	6
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	10
BAB 4. PENUTUP	84
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Sasaran kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Tahun 2024.....	6
Tabel 2. Perjanjian kinerja tahun 2024 Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan.....	7
Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024.....	10
Tabel 4. Capaian IKU Nilai PNBP Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Rp) Triwulan II Tahun 2024	13
Tabel 5. Realisasi Anggaran IKU Nilai PNBP Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Rp) Triwulan II Tahun 2024	15
Tabel 6. Capaian IKU 1 Luas Kawasan Konservasi Baru yang dicadangkan (Ribuan Ha) hingga Triwulan II Tahun 2024	18
Tabel 7. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi Baru yang dicadangkan (Ribuan Ha) Triwulan I Tahun 2024.....	20
Tabel 8. Capaian IKU 1 Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan (Juta Ha) hingga Triwulan II Tahun 2024.....	22
Tabel 9. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan (Juta Ha) Triwulan II Tahun 2024	24
Tabel 10. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	27
Tabel 11. Capaian IKU Luas Kawasan konservasi yang operasional (Juta Ha) Triwulan II Tahun 2024.....	33
Tabel 12. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan konservasi yang operasional (Juta Ha) Triwulan II Tahun 2024	35
Tabel 13. Capaian IKU Luas Kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan Triwulan II Tahun 2024	38
Tabel 14. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan(Juta Ha) Triwulan II Tahun 2024	40
Tabel 15. Capaian IKU Rekomendasi Konvensi Internasional yang Disepakati dan Ditindaklanjuti Triwulan II Tahun 2024	41
Tabel 16. Realisasi Anggaran IKU Rekomendasi Konvensi Internasional yang Disepakati dan Ditindaklanjuti Triwulan II Tahun 2024.....	42

Tabel 17. Capaian IKU Kesepakatan Jejaring Kemitraan dan Kerjasama Konservasi dan Keanekaragaman hayati Laut yang Disepakati(Kesepakatan)Triwulan II Tahun 2024	43
Tabel 18. Realisasi Anggaran IKU Kesepakatan Jejaring Kemitraan dan Kerjasama Konservasi dan Keanekaragaman hayati Laut yang Disepakati(Kesepakatan) Triwulan I Tahun 2024	45
Tabel 19. Capaian IKU Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi(KOMPAK) yang Diverifikasi(Kelompok) Triwulan II Tahun 2024.....	46
Tabel 20. Realisasi Anggaran IKU Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi(KOMPAK) yang Diverifikasi(Kelompok) Triwulan II Tahun 2024 ..	48
Tabel 21. Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau Dilindungi dan/atau Dilestarikan yang Meningkatkan Pengelolaannya (Jenis) Triwulan II Tahun 2024.....	49
Tabel 22. Realisasi Anggaran IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau Dilindungi dan/atau Dilestarikan yang Meningkatkan Pengelolaannya (Jenis) Triwulan II Tahun 2024	54
Tabel 23. Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang Dikelola Pemanfaatannya secara Berkelanjutan (Jenis) Triwulan II Tahun 2024.....	58
Tabel 24. Realisasi Anggaran IKU Jenis Keanekaragaman Hayati yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang Dikelola Pemanfaatannya secara Berkelanjutan (Jenis) Triwulan II Tahun 2024	59
Tabel 25. Capaian IKM Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (%) Triwulan II Tahun 2024	62
Tabel 26. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (Indeks) Triwulan II Tahun 2024.....	63
Tabel 27. Capaian IKM Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi dan Biota Perairan (Nilai) Triwulan II Tahun 2024.....	66
Tabel 28. Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (Dokumen) Triwulan II Tahun 2024	68
Tabel 29. Capaian IKM Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%) Triwulan II Tahun 2024	71
Tabel 30. Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Triwulan II Tahun 2024.....	73
Tabel 31. Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (%) Triwulan II Tahun 2024.....	75

Tabel 32. Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (nilai) Triwulan II Tahun 2024.....	78
Tabel 33. Realisasi anggaran Dit KKHL triwulan II tahun 2024	80

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 Screenshoot nilai NKO dari aplikasi Kinerjaku.kkp.go.id.....	12
Gambar 2. Rincian Penerbitan SAJI LN.....	16
Gambar 3. Sosialisasi Pasca SAJI.....	16
Gambar 4. Integrasi Sistem E-SAJI KKP Dengan INSW Bea Cukai	17
Gambar 5. Sosialisasi Kepada Pelaku Usaha	17
Gambar 6. Peta Sebaran Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2023.....	21
Gambar 7. Koordinasi Percepatan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Gorontalo Utara.....	25
Gambar 8. Rapat Pembahasan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Maluku Utara	25
Gambar 9. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi.....	26
Gambar 10. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA.....	27
Gambar 11. Kerangka Umum Neraca Sumber Daya	29
Gambar 12. Nilai Ekonomi Sumber Daya Laut Tahun 2022	30
Gambar 13. Laman website SIDAKO (Sistem Database Konservasi).....	32
Gambar 14. Rapat Koordinasi Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.....	36
Gambar 15. Rapat Koordinasi Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut.....	37
Gambar 16. Bimbingan Teknis Analisis Data Neraca Sumber Daya Laut.....	37
Gambar 17. Pembahasan Kelayakan Penerapan BLU pada LKKPN Pekanbaru.....	37
Gambar 18. Simposium Hiu dan Pari ke-4 Di Depok.....	55
Gambar 19. Bimtek Pendataan dan Restocking Ikan Napoleon dan Kuda Laut di Belitung	55
Gambar 20. Bimtek Penanganan Mamalia Laut Terdampar di Kalbar.....	56
Gambar 21. Reviu Juknis EPANJI di Makassar	56
Gambar 22. Penyusunan Juknis Pendataan Bambu Laut, Akar Bahar, Kima, dan Lola di Makassar	56

Gambar 23. Pembahasan Usulan Rekomendasi Usulan Kuota Pengambilan Charcharhinidae Uplisting COP19.....	60
Gambar 24. Petunjuk Teknis Pengambilan dari Alam	60
Gambar 25. Pembahasan Revisi Kuota Pengambilan	61
Gambar 26. Pendampingan Penataan Stok Uplisting Hiu.....	61
Gambar 27. Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan (Nusatic & Kontes Arwana)	61
Gambar 28. Pembahasan SPIP dan MR Triwulan I Tahun 2024	69

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.480 pulau-pulau besar dan kecil serta garis pantai sepanjang 95.181 km. Dengan Luas daratan hanya 1,9 juta km², maka 75% wilayah Indonesia berupa lautan, yang terdiri dari 3,1 juta km² wilayah laut teritorial dan 2,7 juta km² zona ekonomi eksklusif (ZEE). Dengan realitas seperti ini, Indonesia tentu saja memiliki potensi sumberdaya kelautan, yang terdiri atas sumberdaya alam dapat pulih (*renewable resources*), sumberdaya alam tidak dapat pulih (*non-renewable resources*), sumber energi kelautan, dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar.

Dengan populasi penduduk yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi, maka eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam pesisir dan laut semakin tinggi dan tidak terkendali. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang bersifat eksploitatif dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, akan menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumberdaya alam tersebut bagi generasi mendatang. Dengan demikian, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif baik dari pihak pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat demi tercapainya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat saat ini dengan kesinambungan ketersediaan sumberdaya pesisir dan laut untuk generasi mendatang. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan hendaknya diimplementasikan dalam pengelolaan sumberdaya.

Salah satu perangkat pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang dipandang efektif adalah melalui pengembangan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K), yakni dengan mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan/atau laut sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk memijah dan berkembang biak dengan baik. Dengan mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, ekosistem terumbu karang yang sehat, dan menyediakan tempat perlindungan bagi sumberdaya ikan, maka pada akhirnya akan mendukung kegiatan perikanan berkelanjutan.

Meningkatnya kebutuhan manusia dan tekanan terhadap lingkungan khususnya sumberdaya hayati laut, mengakibatkan terjadinya penurunan populasi beberapa biota perairan. Hal ini menyebabkan beberapa biota perairan seperti ikan Terubuk, Hiu, Napoleon, Capungan Banggai, Dugong, Penyu, dan Labi-Labi menjadi langka dan terancam punah. Menurut *Fishbase*, 140 jenis ikan di Indonesia terancam punah dan 120 jenis termasuk jenis ikan endemik. Untuk mengatasi penurunan populasi yang terus menerus dan mengantisipasi atau jangan sampai terlambat dalam penyelamatan jenis ikan ini dimasa yang akan datang, maka perlu dilakukan upaya konservasinya meliputi aspek pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan.

Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Didalam Pasal 22 PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan disebutkan bahwa

“Konservasi jenis ikan dilakukan melalui: (a) penggolongan jenis ikan; (b) penetapan status perlindungan jenis ikan; (c) pemeliharaan; (d) pengembangbiakan; dan (e) penelitian dan pengembangan”. Untuk mencapai tujuan konservasi jenis ikan tersebut dan dalam rangka mencapai output berupa jenis ikan terancam punah, langka, endemik yang diidentifikasi, dipetakan, dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan

Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan merupakan salah satu Direktorat pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang diharapkan dapat memberikan peran yang lebih nyata dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. Dengan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam yang ada diharapkan dapat menangani isu-isu strategis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi menuju bangsa yang maju, makmur dan berkeadilan yang dibangun atas dasar keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki melalui penerapan IPTEK dan manajemen profesional, sejalan dengan mandat UU No 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMENKP/2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, serta perlindungan keanekaragaman hayati laut.

1.2. Tugas, Fungsi dan Dasar Hukum

Berdasarkan undang-undang No.17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional yang salah satu misinya menyatakan: *Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional*. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, sesuai dengan fungsi pembangunan kelautan dan perikanan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tersebut dengan Tugas Pokok sebagai berikut :

“Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan dibidang konservasi ekosistem dan biota perairan, konservasi dan

pelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta konservasi sumber daya ikan”.

Sedangkan fungsi dari Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMENKP/2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah :

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi ekosistem, jenis dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber data ikan dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
- 2) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konservasi ekosistem, jenis dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber data ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
- 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
- 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan; dan
- 5) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan mengacu kepada beberapa perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya, diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahannya atas UU no 31 tahun 2004 tentang perikanan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU no. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumberdaya ikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2009 tentang tata cara penetapan kawasan konservasi perairan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.04/Men/2010 tentang pemanfaatan jenis dan genetika ikan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2010 tentang rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2015 tentang kemitraan pengelolaan kawasan konservasi perairan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.47/PERMEN-KP/2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.49/Men/2016 tentang tata cara penetapan perlindungan jenis ikan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang pengelolaan Kawasan konservasi;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi.

1.3. Tantangan Strategis organisasi

Pada saat ini, Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan memiliki berbagai tantangan yang perlu dijawab melalui program-program kerjanya. Tantangan ini sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hingga tantangan yang diturunkan melalui Nawacita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang belum efektif. Efektifitas pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan menjadi sedemikian penting mengingat selain dapat memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Sesuai dengan komitmen Pemerintah RI bahwa sampai tahun 2020 menargetkan 20jt hektar untuk kawasan konservasi laut. Berdasarkan *Convention on Biological Diversity (CBD)* merekomendasikan luas kawasan konservasi laut sebesar 10% dari luas wilayah laut yang dimiliki oleh suatu negara. Kawasan konservasi mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian

sumberdaya ikan di WPP NRI serta menunjang program pariwisata bahari nasional. Penetapan kawasan konservasi di pulau-pulau terluar juga mempunyai peran penting dalam memperkuat kedaulatan NRI.

2. Konservasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah dalam rangka mempertahankan keberlanjutan keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian dan pemulihan populasi masih mengalami hambatan, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya informasi ilmiah dan teknologi pembenihan ikan terancam punah masih belum banyak dikuasai. Otoritas Pengelolaan konservasi sumber daya ikan termasuk pelaksanaan CITES saat ini dalam proses pengalihan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan rencana strategis 2020-2024 Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan adalah **Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut**, dimana sasaran yang akan dicapai selama kurun waktu 2020-2024 adalah: *Terkelolanya 20 juta ha kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan; dan penambahan luas kawasan konservasi perairan menjadi 26,9 juta ha serta terkelolanya 20 jenis biota perairan yang terancam punah, langka, endemik dan dilindungi.*

Rencana Strategis Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan 2020 - 2024 merupakan suatu dokumen yang disusun oleh Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang 2005-2025, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.07/PERMEN-KP/2017 tentang organisasi dan tata kerja kementerian kelautan, serta visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rencana strategis ini juga merupakan acuan dalam perencanaan program kegiatan.

Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Tahun 2024 sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran kegiatan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Tahun 2024

No	Nama Sasaran Kegiatan
1	Meningkatnya Nilai PNBPN Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan
2	Terwujudnya Penambahan Luas dan Kawasan Konservasi yang ditetapkan sebagai Kawasan konservasi Nasional dan/atau Daerah
3	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Berkelanjutan
4	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif
5	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi
6	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan
7	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan
8	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan

Pencapaian Sasaran Kinerja ini kemudian diturunkan kedalam Indikator Kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Perjanjian kinerja tahun 2024 Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	1.	Nilai PNBP Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Rp.000)	15.768.317
2.	Terwujudnya Penambahan Luas dan Kawasan Konservasi yang ditetapkan sebagai Kawasan konservasi Nasional dan/atau Daerah	2.	Luas Kawasan Konservasi Baru yang dicadangkan (Juta Ha)	200
		3.	Luas Kawasan Konservasi yang Ditetapkan (Juta Ha)	2
3.	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Berkelanjutan	4.	Luas Kawasan Konservasi yang Operasional (Juta Ha)	17,8
		5.	Luas Kawasan Konservasi yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan (Juta Ha)	17,8
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif	6.	Rekomendasi Konvensi Internasional yang Disepakati dan Ditindaklanjuti (Dokumen)	6
		7.	Kesepakatan Jejaring, Kemitraan, dan Kerjasama Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan yang Disepakati (Kesepakatan)	5
5.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi	8.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diverifikasi (Kelompok)	20
6.	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan	9.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau Dilindungi dan/atau Dilestarikan yang Meningkatkan Pengelolaannya (Jenis)	20

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
7.	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan	10.	Jenis Keanekaragaman Hayati yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang Dikelola Pemanfaatannya secara Berkelanjutan (Jenis)	7
8	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	11.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)	95
		12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Indeks)	88
		13.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Nilai)	81
		14.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Dokumen)	4
		15.	Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		16.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
		17.	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		18.	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (nilai)	75

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Dit KEBP tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Capaian masing-masing indikator kinerja utama Dit KEBP Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

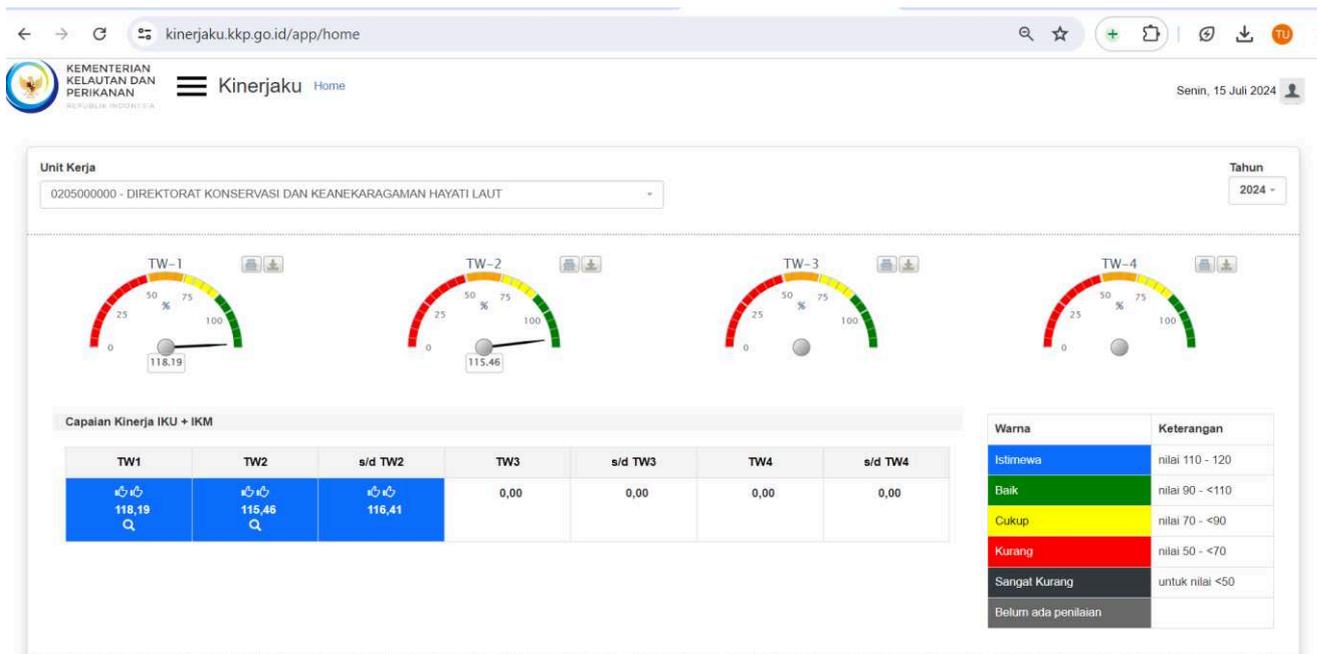
Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW II	Realisasi TW II
1.	Nilai PNBP Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Rp.000)	15.768.317	0	0
2.	Luas Kawasan Konservasi Baru yang dicadangkan (Juta Ha)	200	0	0
3.	Luas Kawasan Konservasi yang Ditetapkan (Juta Ha)	2	0	0
4.	Luas Kawasan Konservasi yang Operasional (Juta Ha)	17,8	0	0
5.	Luas Kawasan Konservasi yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan (Juta Ha)	17,8	0	0
6.	Rekomendasi Konvensi Internasional yang Disepakati dan Ditindaklanjuti (Dokumen)	6	0	0
7.	Kesepakatan Jejaring, Kemitraan, dan Kerjasama Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan yang Disepakati (Kesepakatan)	5	0	0
8.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diverifikasi (Kelompok)	20	5	17
9	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau Dilindungi dan/atau Dilestarikan yang Meningkatkan Pengelolaannya (Jenis)	20	0	0
10	Jenis Keanekaragaman Hayati yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang Dikelola Pemanfaatannya secara Berkelanjutan (Jenis)	7	0	0
11	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)	95	18	27,30
12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Indeks)	88	83	86,79
13	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Nilai)	81	0	0
14	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Dokumen)	4	2	2
15	Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan yang	94	94	100

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET TW II	Realisasi TW II
	Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)			
16.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80	80	100
17.	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)	100	0	0
18.	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (nilai)	75	0	0

Anggaran Direktorat KEBP pada Tahun Anggaran 2024

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	26.641.306.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	2.800.000.000



Gambar 1 Screenshoot nilai NKO dari aplikasi Kinerjaku.kkp.go.id

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (IKU + IKM) Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan pada triwulan II Tahun 2024 sebesar 115,46 (kategori istimewa). Untuk progres capaian untuk masing-masing indikator sebagai berikut

IKU 1. Nilai PNBP Direktorat Konservasi dan Keaneekaragaman Hayati Laut (Rp)

1. Definisi : Penerimaan Negara Bukan Pajak Dit KKHL adalah Penerimaan Negara yang berasal dari:
 - a. Pelayanan penerbitan Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan dan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri untuk pemanfaatan jenis ikan yang masuk dalam Appendiks CITES dan/atau jenis ikan yang dilindungi terbatas dan
 - b. Pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Kawasan Konservasi Nasional

2. Dasar hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan;
 - g. Keputusan Menteri Kelautan dan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Dibatasi Pemanfaatannya Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel 4. Capaian IKU Nilai PNBP Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Rp) Triwulan II Tahun 2024

SK.1		Meningkatnya Nilai PNBP Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan											
IKU - 1		Nilai PNBP Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Rp)											
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenalkan thd TW II Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	-	-	Perhitungan dilaksanakan tahunan				15.768.317	-	-	-	-	-	-

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024
Perhitungan capaian dilakukan secara tahunan namun pada Triwulan II tahun 2024 telah tercapai sebesar Rp.7.009.369.434,- dengan rincian:
 - a) PNBPN atas Layanan Penerbitan SAJI LN sebesar Rp.5.739.539.434
 - b) PNBPN atas Layanan Penerbitan SIPJI sebesar Rp.1.224.830.000
 - c) PNBPN atas Layanan Penerbitan SIUPKK sebesar Rp.45.000.000

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023
Capaian Triwulan II Tahun 2024 Tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2023 karena tidak ada target dan penghitungan capaian IKU ini secara tahunan yaitu pada Triwulan IV Tahun 2024

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DJPRL. Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Renstra DJPRL
Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
Kepatuhan pengguna layanan dalam pembayaran PNBPN, penerimaan PNBPN dari Direktorat KEBP sebesar Rp. 7.009.369.434,-
 - b. Kendala
 - 1) Perhitungan PNBPN dalam aplikasi e-Saji masih perlu pengembangan masih terdapat beberapa perhitungan yang perlu penyesuaian dengan ketentuan
 - 2) Keterbatasan personil dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan atau apendiks CITES
 - c. Solusi
 - 1) Melakukan koordinasi, pembahasan dan pelaksanaan kegiatan melalui skema daring atau secara hybrid (luring dan daring)
 - 2) Melaksanakan sosialisasi Perizininan Berusaha di dalam kawasan konservasi
 - 3) Pengembangan aplikasi seapark.kkp.go.id dan aplikasi saji.kkp.go.id
 - 4) Penambahan personil yang menangani pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan atau apendiks CITES

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring) maka penggunaan sumber daya dapat terlaksana secara efisien dan melibatkan banyak peserta dari berbagai wilayah dengan

7. Kegiatan Pendukung

- a. Layanan Pemanfaatan jenis ikan berupa penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI LN)
 Pelayanan penerbitan SAJI LN dengan jumlah permohonan 1613 dokumen SAJI dari 83 perusahaan yang mengajukan.
- b. Layanan Penerbitan Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)
 Direktorat KEBP melaksanakan kegiatan verifikasi untuk permohonan Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan untuk Jenis Ikan dilindungi dan/atau masuk dalam Appendiks CITES. Dari permohonan yang masuk hingga Triwulan II tahun 2024 jumlah yang disetujui dan dapat diterbitkan sebanyak 118 SIPJI yang terdiri dari 2 SIPJI Aquaria; 77 SIPJI Perdagangan Dalam Negeri; 13 SIPJI Pengembangbiakan dan 26 SIPJI Perdagangan Luar Negeri.
- c. Pengembangan Aplikasi saji.kkp.go.id
- d. Pengembangan Aplikasi Seapark.kkp.go.id
- e. Sosialisasi pelayanan pemanfaatan jenis ikan
 Bimbingan Teknis Update Sistem Aplikasi e-SAJI. Kegiatan ini dilaksanakan pada 4 juli 2024 di Bali. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini agar para stakeholder pengguna aplikasi dapat menggunakan aplikasi dan mendapatkan informasi mengenai update yang telah dilaksanakan pada sistem e-SAJI khususnya penerapan PASCA SAJI.

8. Realisasi Anggaran

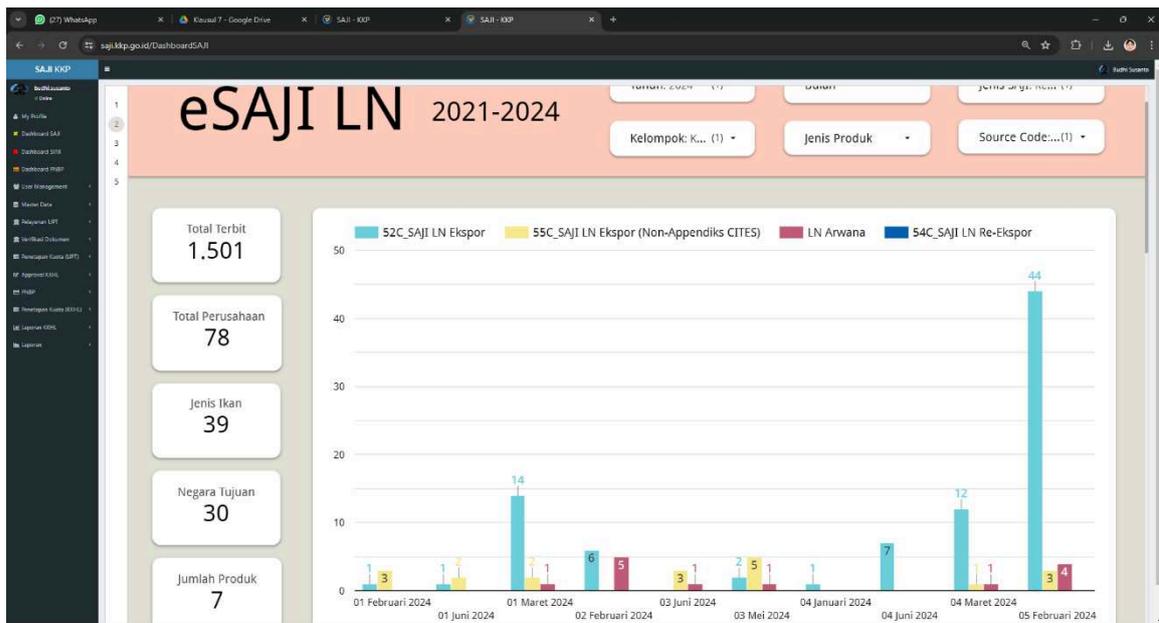
Tabel 5. Realisasi Anggaran IKU Nilai PNBPN Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Rp) Triwulan II Tahun 2024

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Sosialisasi perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Appendiks CITES dan/atau Jenis Ikan Dilindungi	811.000.000	391.688.284	48,30
2.	Pengembangan Layanan Pemanfaatan E-SAJI-PNBP	371.483.000	36.681.750	9,87
3.	Dukungan Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Jenis Ikan-PNBP	2.600.757.000	897.126.024	34,49
4.	Peningkatan Kompetensi Petugas Perizinan dan Penerbitan Dokumen Pengangkutan atas Pemanfaatan Jenis Ikan Yang	404.010.000	150.952.668	37,36

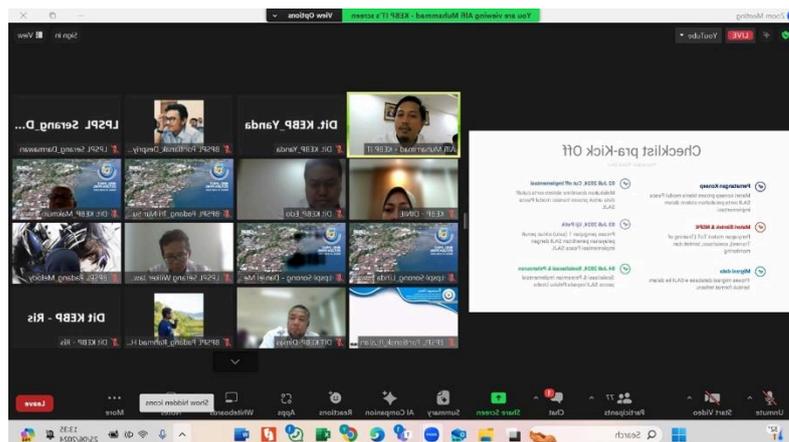
No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	Dilindungi dan/atau Appendiks CITES-PNBP			
5.	Penyusunan NDF Jenis Ikan Appendiks CITES - PNBP	286.650.000	62.686.690	21,87
Jumlah		4.473.900.000	1.539.135.416	34,40

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

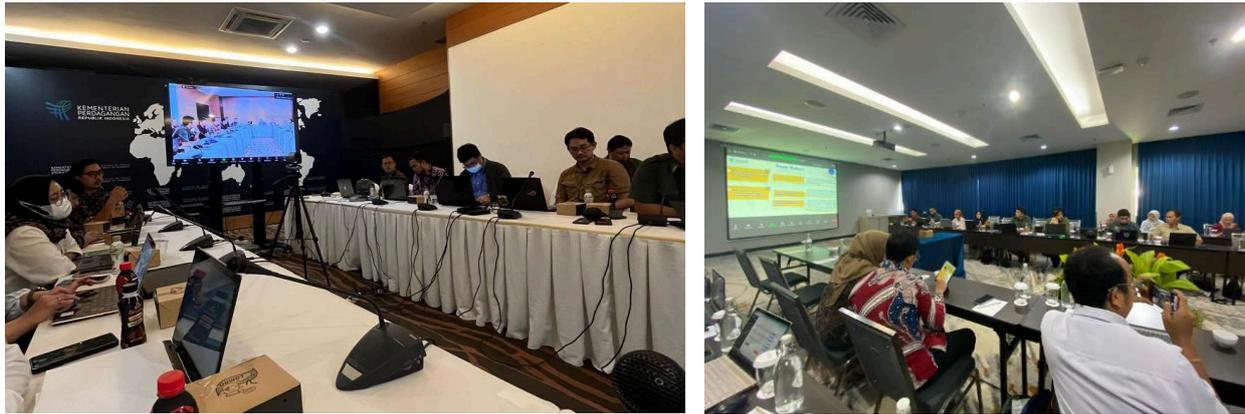
- a. Pelayanan Pemanfaatan jenis ikan melalui penerbitan SAJI LN dan SIPJI
- b. Pemberlakuan PASCA SAJI
- c. Pengembangan menu aplikasi seapark.kkp.go.id



Gambar 2. Rincian Penerbitan SAJI LN



Gambar 3. Sosialisasi Pasca SAJI



Gambar 4. Integrasi Sistem E-SAJI KKP Dengan INSW Bea Cukai



Gambar 5. Sosialisasi Kepada Pelaku Usaha

IKU 2. Luas Kawasan Konservasi Baru yang dicadangkan (Ribu Ha)

Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pencadangan dan Penetapan Kawasan Konservasi merupakan salah satu upaya perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi tersebut diharapkan dapat menjaga sistem rantai makanan dan siklus hidup ikan ekonomis penting; menjamin keberadaan budaya, adat istiadat dan nilai sejarah; dan menjamin akses area masyarakat lokal dalam pemanfaatan kawasan konservasi sehingga dapat mengurangi laju degradasi habitat dan kepunahan sumberdaya ikan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Hingga akhir tahun 2023, telah dialokasikan Kawasan Konservasi seluas 29,2 juta hektare. Pada tahun 2023, pencapaian penambahan luas Kawasan Konservasi berdasarkan pencadangan Kawasan Konservasi Daerah oleh Gubernur, Kawasan Konservasi Nasional yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga capaian luas kawasan konservasi adalah 29,2 juta hektar. Capaian luasan tersebut terdiri dari:

- a. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh MKP seluas 17,8 juta hektar, baik Kawasan Konservasi Nasional maupun Kawasan Konservasi Daerah.

- b. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4,5 juta hektar.
- c. Kawasan Konservasi yang dicadangkan seluas 6,9 juta hektar.

Definisi Indikator Kinerja Utama ini yaitu Kawasan Konservasi yang dicadangkan oleh Gubernur, Menteri Kelautan dan Perikanan. Kawasan Konservasi ditetapkan melalui tahapan: a) usulan inisiatif calon Kawasan Konservasi; b) identifikasi dan inventarisasi; c) pencadangan; dan d) penetapan. Selain tahapan tersebut, penetapan Kawasan Konservasi dapat dilakukan berdasarkan pencadangan yang alokasi ruangnya telah ditetapkan dalam dokumen RZ. Usulan inisiatif calon Kawasan Konservasi dapat diajukan oleh: a) Pemerintah; b) Pemerintah Daerah; c) Masyarakat Hukum Adat yang wilayah kelolanya telah ditetapkan; atau d) Setiap orang. Pengajuan usulan inisiatif calon Kawasan Konservasi disampaikan kepada: a) Menteri dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota terkait; b) gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan bupati/wali kota terkait. Pengajuan usulan inisiatif calon Kawasan Konservasi berupa kajian awal dan peta lokasi yang mencantumkan target konservasi. Target konservasi berupa: a) keanekaragaman hayati; b) sumber daya ikan dan habitatnya; atau c) Situs Budaya Tradisional.

Pencadangan Kawasan Konservasi ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Penetapan pencadangan Kawasan Konservasi oleh Menteri atau gubernur paling sedikit memuat:

- a. tujuan pembentukan Kawasan Konservasi;
- b. luasan Kawasan Konservasi;
- c. target konservasi;
- d. kategori Kawasan Konservasi;
- e. ketentuan kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi; dan
- f. peta Kawasan Konservasi dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) yang memuat batas luar dan Zonasi Kawasan Konservasi.

Pencadangan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri atau gubernur diintegrasikan ke dalam dokumen RZ.

Penghitungan pencapaian target dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan luas kawasan konservasi yang dicadangkan melalui SK Gubernur dan/atau Menteri KP. Perhitungan IKU Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan pada tahun 2024 dilakukan di akhir tahun. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat KEBP, target IKU Kawasan Konservasi yang dicadangkan pada tahun 2024 yaitu 200 ribu Ha.

Tabel 6. Capaian IKU 1 Luas Kawasan Konservasi Baru yang dicadangkan (Ribu Ha) hingga Triwulan II Tahun 2024

SK.2		Terwujudnya Kawasan Konservasi yang ditetapkan di tingkat Nasional dan/atau Daerah											
IKU - 2		Luas Kawasan Konservasi Baru yang dicadangkan(Ribu Ha)											
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	-	-	Perhitungan dilaksanakan tahunan				200	-	-	-	-	-	-

1. Capaian IKU pada Triwulan II pada Tahun 2024
Pengukuran IKU Luas Kawasan Konservasi Baru yang dicadangkan dilakukan secara tahunan, namun pada Triwulan II Tahun 2024 terdapat capaian Kawasan Konservasi yang dicadangkan yaitu Kawasan Konservasi di Perairan di Laut Sulawesi yang dicadangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2024 melalui Kepmen KP No 13 Tahun 2024 seluas 603.511,30 Ha pada tanggal 26 Februari 2024.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Kinerja Triwulan II 2023
Pengukuran IKU Luas Kawasan Konservasi Baru yang dicadangkan dilakukan secara tahunan sehingga belum dapat diukur capaiannya pada Triwulan II Tahun 2024.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
Pengukuran IKU Luas Kawasan Konservasi Baru yang dicadangkan dilakukan secara tahunan sehingga belum dapat diukur capaiannya pada Triwulan II Tahun 2024.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Renstra DJPRL
Pengukuran IKU Luas Kawasan Konservasi Baru yang dicadangkan dilakukan secara tahunan sehingga belum dapat diukur capaiannya pada Triwulan I Tahun 2024.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Pengukuran IKU Luas Kawasan Konservasi Baru yang dicadangkan dilakukan secara tahunan sehingga belum dapat diukur capaiannya pada Triwulan II Tahun 2024. Namun, realisasi capaian pada Triwulan II 2024 sebesar 600 ribu hektare. Nilai tersebut menunjukkan bahwa realisasi capaian pada Triwulan I Tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.
 - a. Kendala/Permasalahan
Dalam pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi terdapat kendala, yaitu: lokasi kawasan konservasi yang berada di atas 12 mil laut dengan perubahan cuaca yang cukup dinamis di Laut Sulawesi menjadi tantangan dan kendala dalam pengambilan data survei lapangan dan target konservasi.
 - b. Solusi
Koordinasi dan sinkronisasi bersama dengan Pemerintah Daerah, UPT, para *stakeholder* dan mitra konservasi dalam pengumpulan data dan survei lapangan identifikasi target konservasi.
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam proses pembentukan dan penetapan kawasan konservasi, UPT dan LSM/Mitra juga turut mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain indentifikasi dan inventarisasi data monitoring biofisik dan sosekbud, penyusunan rencana zonasi, rencana Pengelolaan, serta konsultasi publik dengan stakeholder.
7. Kegiatan pendukung
Pada Triwulan II 2024 belum ada kegiatan pendukung yang dilakukan terkait pencadangan kawasan konservasi.

8. Realisasi Anggaran

Tabel 7. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi Baru yang dicadangkan (Ribu Ha) Triwulan I Tahun 2024

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	300.000.000	137.844.610	45,95
Jumlah		300.000.000	137.844.610	45,95

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku untuk mendorong pencadangan kawasan konservasi seluas 200 ribu Ha.

IKU 3. Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan (Juta Ha)

Penetapan Kawasan Konservasi merupakan salah satu upaya perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi tersebut diharapkan dapat menjaga sistem rantai makanan dan siklus hidup ikan ekonomis penting; menjamin keberadaan budaya, adat istiadat dan nilai sejarah; dan menjamin akses area masyarakat lokal dalam pemanfaatan kawasan konservasi sehingga dapat mengurangi laju degradasi habitat dan kepunahan sumberdaya ikan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Pada Konferensi Para Pihak (COP) ke-15 yang diselenggarakan pada Desember 2022, ditutup dengan diadopsinya apa yang kini dikenal dengan sebutan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal) oleh lebih dari 190 negara, dan memiliki empat tujuan yang akan dicapai pada 2050, dan 23 target yang akan dicapai pada 2030. Termasuk salah satunya Target 3 dengan rencana ambisius untuk melindungi 30% laut sejagad pada 2030 melalui jejaring Kawasan Konservasi Laut dan Upaya Konservasi berbasis-luasan Efektif Lain, yang populer dengan sebutan Target 30x30! Lebih jauh lagi, target ambisius ini dicanangkan untuk mendorong pencapaian apa yang disebut dengan “Global Goal for Nature: Nature Positive by 2030” (Gambar 1.1). Diharapkan sejak 2030 semua kegiatan manusia tidak lagi menggerus, tetapi sebaliknya malah menyumbang kepada pemulihan dan penguatan keanekaragaman hayati, sejak dari tingkat lokal dan nasional, ke tingkat regional sampai global.

Pemerintah Indonesia menargetkan Kawasan Konservasi seluas 32,5 juta konservasi atau sebesar 10% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2030. Target ini sesuai dengan komitmen global Konvensi Keanekaragaman Hayati Dunia (Convention on Biological Diversity/CBD)–Aichi Target 11, dan Sustainable Development Goal 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 menargetkan penambahan luas kawasan menjadi 26,9 juta konservasi pada tahun 2024. Pada tahun 2021 target tersebut telah terlampaui, sebesar 28,4 Juta Hektar. Namun demikian,

Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan upaya penambahan luas kawasan konservasi. Bahkan KKP menargetkan penambahan luasan kawasan konservasi 30% sampai dengan 2045 guna mendukung Ekonomi Biru.

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (17/PERMENKP/2020) menargetkan Luas Kawasan Konservasi Perairan sampai dengan tahun 2024 adalah seluas 26,9 Juta Ha. Hingga akhir tahun 2023, telah dialokasikan Kawasan Konservasi seluas 29,2 Juta Ha. Pada tahun 2023, pencapaian penambahan luas Kawasan Konservasi berdasarkan pencadangan Kawasan Konservasi Daerah oleh Gubernur, Kawasan Konservasi Nasional yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga capaian luas kawasan konservasi adalah 29,2 Juta Ha. Capaian luasan tersebut terdiri dari:

- Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh MKP seluas 17,8 juta hektar, baik Kawasan Konservasi Nasional maupun Kawasan Konservasi Daerah.
- Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4,5 juta hektar.
- Kawasan Konservasi yang dicadangkan seluas 6,9 juta hektar.



Gambar 6. Peta Sebaran Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2023

Definisi Indikator Kinerja Utama ini yaitu Kawasan konservasi yang ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan. Setelah suatu kawasan konservasi dicadangkan melalui SK Pencadangan atau Perda RZWP3K provinsi, selanjutnya kawasan konservasi tersebut disusun zonasi dan rencana pengelolaannya. Zonasi kawasan konservasi tersebut diusulkan penetapan oleh Gubernur kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Pengelolaan Ruang Laut melakukan evaluasi usulan penetapan kawasan konservasi. Evaluasi dilakukan terhadap aspek teknis dan aspek

hukum kawasan konservasi. Direktur KKHL melakukan evaluasi aspek teknis kawasan konservasi. Apabila kawasan konservasi yang diusulkan memenuhi syarat aspek teknis, maka selanjutnya disampaikan usulan penetapan kawasan konservasi yang telah dilakukan evaluasi aspek teknis kepada Sekretaris Ditjen PRL untuk dilanjutkan evaluasi aspek hukum oleh Sekretaris Ditjen PRL dan Biro Hukum & Organisasi-Setjen.

Penghitungan pencapaian target dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan luas kawasan konservasi yang ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan. Perhitungan IKU Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan pada tahun 2024 dilakukan per tahun. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat KEBP, target IKU Kawasan Konservasi yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 2 Juta Ha.

Tabel 8. Capaian IKU 1 Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan (Juta Ha) hingga Triwulan II Tahun 2024

SK.2		Terwujudnya Kawasan Konservasi yang ditetapkan di tingkat Nasional dan/atau Daerah											
IKU - 3		Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan(Juta Ha)											
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	-	-	Perhitungan dilaksanakan tahunan				2	-	-	-	-	-	

1. Capaian IKU pada Triwulan II pada Tahun 2024
 Pengukuran IKU Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan dilakukan secara tahunan, namun pada Triwulan II Tahun 2024 sudah terdapat capaian luas kawasan yang ditetapkan oleh MenKP sebagai berikut:
 - a. Kepmen KP Nomor 12 Tahun 2024
 - b. Kepmen KP Nomor 34 Tahun 2024
 - c. Kepmen KP Nomor 35 Tahun 2024
 - d. Kepmen KP Nomor 36 Tahun 2024
 - e. Kepmen KP Nomor 37 Tahun 2024
 - f. Kepmen KP Nomor 38 Tahun 2024

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Kinerja Triwulan II 2023
 Pengukuran IKU Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan dilakukan secara tahunan sehingga belum dapat diukur capaiannya pada Triwulan II Tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
 Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP untuk IKU Kawasan Konservasi yang ditetapkan adalah 7,8 juta hektare. Realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 sebesar 6,74 juta hektare atau sebesar 86,41% dari target Jangka Menengah.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Renstra DJPRL

Target Renstra DJPRL IKU Kawasan Konservasi yang ditetapkan adalah 7,8 juta hektare. Realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 sebesar 6,74 juta hektare atau sebesar 86,41% dari target Renstra DJPRL.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Pengukuran IKU Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan dilakukan secara tahunan sehingga belum dapat diukur capaiannya pada Triwulan II Tahun 2024. Namun, pada Triwulan II 2024 ini telah ada penetapan kawasan konservasi seluas 0,017 juta ha atau 0,86% dari target tahun 2024.

b. Kendala/Permasalahan

Dalam pelaksanaan penetapan kawasan konservasi terdapat beberapa kendala, yaitu:

1. Kebijakan Nasional dalam penyesuaian anggaran, komunikasi dan koordinasi dengan instansi lainnya, penyesuaian dan penyamaan waktu antar stakeholder terkait dalam melakukan kegiatan.
2. Anggaran untuk penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi masih belum dapat digunakan karena proses administrasi belum selesai dari Kementerian Keuangan
3. Terbatasnya SDM GIS/Pemetaan Kawasan Konservasi di Pemerintah Daerah sehingga perlu pendampingan dan asistensi Pemerintah Pusat (KKHL dan UPT Ditjen PRL) khususnya dalam menyusun zonasi kawasan konservasi.

c. Solusi

1. Koordinasi dan sinkronisasi secara virtual/video conference untuk mempercepat penetapan kawasan konservasi dengan para stakeholder antara lain Pemerintah Pusat (Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PRL), Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, dan mitra/LSM di masing-masing wilayah kerjanya.
2. Melakukan koordinasi dengan DKP Provinsi, Setditjen PKRL, dan Kementerian Keuangan untuk memantau perkembangan anggaran.
3. Mendampingi dan memberi asistensi teknis dalam penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi (antara lain: Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Gorontalo, Sumatera Utara, dan Maluku Utara)

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Direktorat KEBP bersama dengan B/LPSPL (UPT Ditjen PRL) mendampingi Pemerintah Daerah secara teknis dalam setiap proses penetapan kawasan konservasi. Dalam proses pembentukan dan penetapan kawasan konservasi, LSM/Mitra juga turut mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain indentifikasi dan inventarisasi data monitoring biofisik dan sosekbud, penyusunan rencana zonasi, rencana Pengelolaan, serta konsultasi publik dengan stakeholder.

7. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung IKU Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan pada Triwulan II Tahun 2024, meliputi:

- a) Penetapan Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Kayuadi Provinsi Sulawesi Selatan melalui Kepmen KP Nomor 34 Tahun 2024 seluas 6899,43 Ha (tanggal 15 Mei 2024)
- b) Penetapan Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Pulau Panikiang Provinsi Sulawesi Selatan melalui Kepmen KP Nomor 35 Tahun 2024 seluas 496,8 Ha (tanggal 15 Mei 2024)
- c) Penetapan Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Pasi Gusung Provinsi Sulawesi Selatan melalui Kepmen KP Nomor 36 Tahun 2024 seluas 1769,73 Ha (tanggal 15 Mei 2024)
- d) Penetapan Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Pulau Salahnama Provinsi Sumatera Utara melalui Kepmen KP Nomor 37 Tahun 2024 seluas 3806,14 Ha (tanggal 15 Mei 2024)
- e) Penetapan Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Betahwalang Provinsi Jawa Tengah melalui Kepmen KP Nomor 38 Tahun 2024 seluas 244,88 Ha (tanggal 15 Mei 2024)
- f) Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Pulau Cermin Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 Mei 2024
- g) Koordinasi Percepatan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo tanggal 21-22 Mei 2024
- h) Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Timur Patani-Bicoli, Pulau Sayafi, dan Pulau Jiew Provinsi Maluku Utara Provinsi Maluku Utara tanggal 3 Juni 2024
- i) Pendampingan Teknis dan Koordinasi terkait Usulan Calon Kawasan Konservasi Pulau Maspari Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 Juni 2024
- j) Pembahasan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Pulau Pini Provinsi Sumatera Utara, Kawasan Konservasi di Perairan Sawo-Lahewa Provinsi Sumatera Utara, dan Kawasan Konservasi Perairan Timur Patani-Bicoli, Pulau Sayafi, dan Pulau Jiew Provinsi Maluku Utara tanggal 21 Juni 2024

8. Realisasi Anggaran

Tabel 9. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan (Juta Ha) Triwulan II Tahun 2024

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	300.000.000	137.844.610	45,95
Jumlah		300.000.000	137.844.610	45,95

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

- a) Koordinasi Percepatan penetapan kawasan konservasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait antara lain Pemerintah Daerah, UPT dan Mitra Konservasi di Sulawesi Utara, Maluku, NTB, NTT, DIY, Bali, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara.

- b) Melakukan asistensi dan pendampingan teknis dalam rangka penetapan usulan kawasan konservasi (antara lain di Provinsi Bali, Sumatera Utara, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau).



Gambar 7. Koordinasi Percepatan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Gorontalo Utara



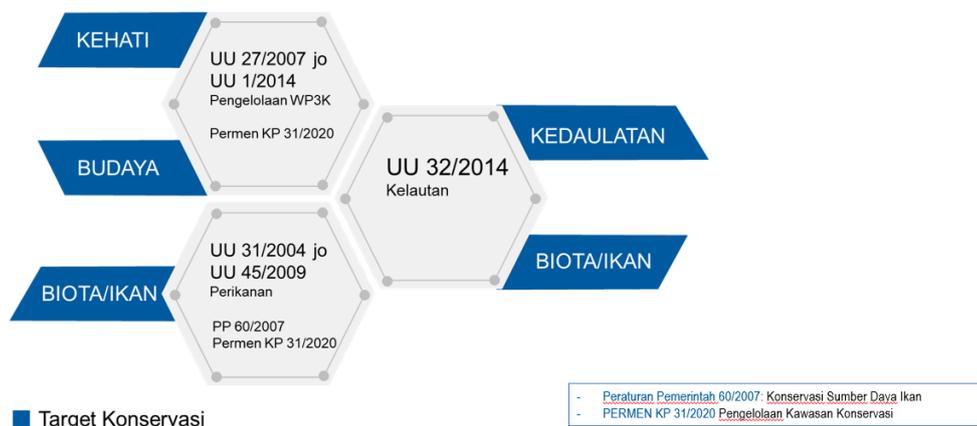
Gambar 8. Rapat Pembahasan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Maluku Utara

IKU 4. Luas Kawasan konservasi yang operasional (Juta Ha)

Menurut IUCN (2012) kawasan konservasi merupakan suatu area yang memiliki batas geografis jelas, diakui, ditunjukkan, dan dikelola secara legal (formal) atau oleh (aturan) cara-cara efektif lainnya untuk mencapai tujuan jangka panjang konservasi alam serta jasa-jasa ekosistem dan nilai budaya yang berasosiasi dengannya. Manfaat Kawasan Konservasi sebagai berikut:

1. Keanekaragaman Hayati: mempertahankan spesies dan ekosistem target serta spesies lain didalamnya.
2. Perikanan: ikan dewasa berlimpah dan bereproduksi lebih efektif, memungkinkan anak-anak ikan mendapat cukup makanan serta tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, ikan dewasa akan menyebar ke perairan yang kurang padat (spill over), dan larva-larva ikan juga akan terbawa arus keluar kawasan (export larvae).
3. Manfaat Sosial, Ekonomi dan Budaya: mengurangi konflik, membangun kerjasama, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mempertahankan kearifan lokal.

Mandat pembentukan kawasan konservasi di Indonesia digambarkan pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 9. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi

Tantangan luasnya kawasan konservasi di Indonesia adalah pengelolaan kawasan konservasi tersebut sehingga dapat menunjukkan manfaat keberadaan kawasan konservasi terhadap keanekaragaman hayati, perikanan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Di samping hal tersebut, tantangan lain adalah status dari kawasan konservasi itu sendiri. Dalam hal untuk mengetahui sejauh mana tingkat kegiatan-kegiatan pengelolaan mencapai tujuan-tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan pada tahun 2024, maka diperlukan adanya suatu evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Didalam pelaksanaan pengelolannya, mengikuti PERMEN KP 31/2020 tentang Pengelolaan kawasan konservasi yang memuat pembentukan, pengelolaan, pemanfaatan, dan evaluasi pengelolaan. Kawasan Konservasi yang operasional adalah Kawasan konservasi yang telah ditetapkan dan dioperasikan pengelolannya dalam rangka peningkatan kualitas target konservasi. Dit KEBP mendukung operasionalisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 17,8 Juta Ha melalui kegiatan: 1) evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, 2) regulasi kebijakan dan SOP, 3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola, 4) pengembangan sistem data pengelolaan kawasan konservasi, dan 5) penyusunan neraca sumber daya laut.

1. Evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

Evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA) dilakukan menggunakan perangkat ukur yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kawasan konservasi dievaluasi dengan serangkaian pertanyaan yang dikategorikan berdasarkan kriteria

input, proses, output, dan outcome. Evaluasi efektivitas ini telah mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola). Hasil penilaian dari keseluruhan indikator tersebut akan menjadi bahan untuk evaluasi pengelolaan kawasan konservasi yang bersifat adaptif. Secara lebih detail, kerangka pikir disajikan pada Gambar di bawah ini:



Gambar 10. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50 – 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Pada Tahun 2024, Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dilakukan terhadap Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sampai dengan tahun 2023 oleh Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 17 Tahun 2024.

Luas Kawasan Konservasi Tahun 2023 adalah 29,3 Juta Ha tersebut, yang terdiri dari 22,4 Juta Ha ditetapkan oleh Menteri (baik Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan 6,9 Juta Ha pencadangan oleh Kepala Daerah. Dari 22,4 Juta Ha tersebut, 17,8 Juta Ha yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023. Sehingga, luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan adalah 17,8 juta Ha. Pada tahun 2024, target luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan seluas 17,8 Juta Hektar yang merupakan kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebanyak 117 Kawasan, terdiri dari 5,8 Juta Ha Kawasan Konservasi Nasional (11 Kawasan Konservasi Nasional) dan 12 Juta Hektar Kawasan konservasi Daerah (106 Kawasan Konservasi Daerah)

Pengukuran IKU Luas Kawasan konservasi yang operasional (Juta Ha) dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada Triwulan II Tahun 2024 yang telah dilaksanakan yaitu:

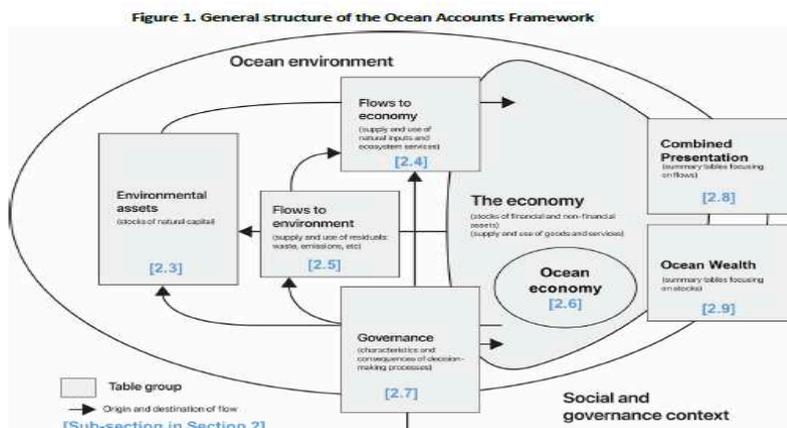
1. Pertemuan Koordinasi Tim Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) 2024 pada tanggal 29 - 30 Mei 2024
2. Pengumpulan data dan informasi pendukung penilaian EVIKA yang dimohonkan melalui Surat Permohonan Data Dukung Penilaian EVIKA yang ditujukan kepada pengelola 117 kawasan konservasi tanggal 3 Juni 2024
3. Persiapan dan Pembahasan Hal Teknis Simposium Internasional Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi tanggal 3 Juni 2024

Rencana kegiatan penilaian EVIKA pada tahun 2024 akan dilakukan terhadap 117 Kawasan yang sudah ditetapkan pada tahun 2023 atau seluas 17,8 Juta Ha yang akan diawali dengan pembentukan Tim Penilai dengan SK Kepdirjen, BIMTEK EVIKA Tim Penilai, pelaksanaan kegiatan penilaian EVIKA yang dilakukan oleh masing-masing kelompok Tim Penilai, Rapat Pleno dan Pelaporan hasil penilaian EVIKA ke Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

2. Neraca Sumber Daya Laut

Neraca sumber daya alam (termasuk laut) merupakan salah satu agenda/mandat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dan kesepakatan global melalui *Convention on Biological Diversity* (CBD), *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan *High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy* (HLP SOE). Pada Bulan Mei 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah menandatangani perjanjian kerja sama hibah dengan Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) dalam Program Laut untuk Pembangunan (*Ocean for Development Programme*). Pada Bulan Desember 2022 lalu, telah disepakati secara global dalam sidang *Convention on Biological Diversity* (CBD) ke-15 untuk memutuskan dan mendorong negara-negara untuk menyusun neraca sumber daya laut dan memanfaatkannya untuk mendukung kebijakan pemanfaatan laut secara keberlanjutan.

Neraca Sumber Daya Laut menjadi suatu alat ukur atau sebagai penghitungan nilai besaran dari dampak pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut serta mengukur kualitas dan potensi sumber daya kelautan. Ocean Accounting merupakan kompilasi informasi yang terstruktur – konsisten dan dapat dibandingkan. Kerangka kerja (Framework) NSDL terdiri dari 7 akun mulai dari Neraca Aset, Neraca Arus ke Ekonomi, Neraca Arus ke Lingkungan, Ekonomi Kemaritiman, Tata Kelola, Presentasi Gabungan, dan Kekayaan Nasional. Framework Ocran Accounts dapat dilihat pada Gambar dibawah ini



Gambar 11. Kerangka Umum Neraca Sumber Daya

Sejak tahun 2020, DJPRL bersama BIG, BPS, Kementerian Keuangan dan mitra lainnya telah menginisiasi penyusunan neraca sumber daya laut dengan lokasi percontohan di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra. Kolaborasi tersebut saat ini juga didukung oleh Global Ocean Account Partnership (GOAP), dimana UN ESCAP menjadi salah satu co-chairnya. Pada tanggal 26 Maret 2024, Tim kolaborasi lintas K/L tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 22 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut..

Direktorat KEBP beserta dengan Tim Pakar, K/L dan Mitra terkait diantaranya BIG, Bappenas, BPS, Kemenkeu, Kemenkomarves, BRIN, Unit Kerja Eselon II Lingkup DJPRL, UPT Lingkup DJPRL, dan Yayasan Rekam masuk dalam Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut pada tahun 2024. Pada tahun 2024 kegiatan survei akan dilakukan pada Kawasan Konservasi Nasional Laut Sawu dan Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Kapoposang.

Untuk mendukung penyusunan Neraca Sumberdaya Laut, pada tahun 2024 dibentuk Tim Andalusia atau Analisis Nilai Sumber Daya Laut Indonesia yang memiliki tujuan jangka panjang untuk mendapatkan nilai ekonomi suatu ekosistem, pengembangan indikator untuk memantau perubahan terhadap asset modal alam dari laut, membuat *ecosystem framework* sebagai tools dalam pengambil keputusan kebijakan dan mengintegrasikan Andalusia dalam kerangka *Blue Economy* Indonesia. Adapun nilai ekonomi layanan ekosistem sumber daya laut Indonesia pada Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 12. Nilai Ekonomi Sumber Daya Laut Tahun 2022

Pada Triwulan II Tahun 2024, telah dilakukan beberapa kegiatan, antara lain: Rapat Koordinasi Tim Neraca Sumber Daya Laut pada tanggal 15 Mei 2024, survei kegiatan pengambilan data Neraca Sumber Daya Laut (data sosial ekonomi dan biofisik) di Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kapoposang tanggal 13-23 Mei 2024 dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional TNP Laut Sawu di Kupang tanggal 27 Mei – 5 Juni 2024, di Rote tanggal 14-23 Mei 2024 bersama Tim BIG, BKKPN Kupang, dan Direktorat KEBP. Selain itu, telah dilakukan kunjungan Tim Survei Analisis Nilai Sumber Daya Laut ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 6-11 Mei 2024 dan kegiatan survei pengumpulan data karbon biru di TNP Laut Sawu pada tanggal 21-28 Juni 2024. Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada Triwulan III adalah launching produk *ocean account* atau neraca sumber daya laut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

3. Regulasi Kebijakan dan SOP

Kawasan konservasi yang telah ditetapkan pengelolaannya dilakukan oleh SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola) yang dapat berbentuk unit pelaksana pusat, OPD, unit pelaksana daerah, atau cabang dinas. SUOP sebagai pengelola kawasan konservasi memiliki tugas mulai dari melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan kawasan konservasi sampai dengan melakukan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkala. Untuk menunjang pihak pengelola dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi Direktorat KEBP pada tahun 2024 menginisiasi penyusunan pedoman teknis sebanyak kurang lebih 5 NSPK yaitu, NSPK Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, NSPK Pemanfaatan Kawasan Konservasi, NSPK perlindungan/pelestarian keanekaragaman hayati perairan, NSPK dalam rangka pemanfaatan jenis ikan Appendix CITES dan/atau Jenis ikan Dilindungi, dan Pembahasan Juknis KOMPAK. Pada tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan bertanggung jawab dalam penyusunan regulasi dan SOP tentang pengaturan akses kapal melintas dalam kawasan konservasi dengan otoritas pelayaran. Adanya regulasi tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan

Nasional Tahun 2018 - 2025. Dimana KKP berkoordinasi dengan Pushidrosal dan Kemenhub untuk menghasilkan standarisasi tanda batas dan fungsi keselamatan pelayaran di kawasan konservasi perairan.

Selain itu, untuk mensupport IKU Luas Kawasan Konservasi yang Operasional terutama turunan dari NSPK Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil akan dilakukan penyusunan beberapa dokumen diantaranya naskah akademik revisi Permen KP 31 Tahun 2020, Penyusunan Kriteria P/KKPRL di Kawasan Konservasi, dan Pedoman SNI Ocean Accounting pada tahun 2024 ini. Adanya penyusunan pedoman teknis pengelolaan kawasan konservasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman yang bisa diadopsi dan digunakan oleh pihak pengelola dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

Pada Triwulan II 2024, Direktorat KEBP telah melakukan beberapa kegiatan terkait penyusunan regulasi kebijakan dan SOP, antara lain: 1) Konsultasi Pakar dalam rangka Penyusunan Panduan Pengembangan Kawasan Konservasi tanggal 2 April 2024, 2) Pembahasan Laporan Cost Benefit Analysis for MPA Vision 30x45 tanggal 3 April 2024, 3) Pembahasan Materi National Determined Contribution (NDC) terkait Kawasan Konservasi dan muatan norma Result Based Payment (RBP) tanggal 23 April 2024, 4) Pertemuan Pembahasan Revisi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi tanggal 8 Mei 2024, 5) Pembahasan Materi National Determined Contribution (NDC) terkait Kawasan Konservasi dan muatan norma Result Based Payment (RBP) tanggal 14 Mei 2024, 6) Penyusunan Panduan Praktis Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca di dalam Kawasan Konservasi tanggal 16 Mei 2024, 7) Rapat Pembahasan RSNI Neraca Sumber Daya Laut tanggal 20 Mei 2024, 8) Paparan Kajian Penerapan BLU pada LKKPN Pekanbaru tanggal 30 Mei - 1 Juni 2024, 9) High Integrity Blue Carbon Market Technical Workshop tanggal 11-14 Juni 2024 10) Pembahasan Kelayakan Penerapan BLU pada LKKPN Pekanbaru tanggal 14 Juni 2024 11) Pertemuan Konsensus RSNI Neraca Spasial tanggal 14 Juni 2024, 12) Koordinasi Pembentukan SUOP dan Kelembagaan Kawasan Konservasi Provinsi Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Papua Barat, dan Papua Barat Daya bersama dengan Mitra Konservasi tanggal 24 Juni 2024.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan SDM Pengelola Kawasan Konservasi Direktorat KEBP pada tahun 2024 akan melaksanakan beberapa kegiatan sertifikasi kompetensi SDM pengelola kawasan konservasi. Beberapa upaya atau langkah yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan mengadakan beberapa BIMTEK dan Workshop atau pelatihan. Adapun BIMTEK yang akan dilaksanakan diantaranya BIMTEK Enumerator Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan untuk peningkatan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil rekomendasi penilaian EVIKA sebagian besar pengelola belum memiliki sertifikasi tingkat dasar maupun lebih dari tingkat dasar. Rencana pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi monitoring sosial ekonomi akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV tahun 2024.

Selanjutnya, bersama dengan beberapa Mitra Konservasi akan dilaksanakan kegiatan BIMTEK Rehabilitasi Habitat atau Ekosistem Terumbu Karang yang rencananya akan dilaksanakan di Kawasan Konservasi Nasional pada Triwulan IV 2024, dan yang terakhir kaitannya dengan penyiapan SDM untuk Neraca Sumber Daya Laut dan Penyusunan NDC

akan dilaksanakan Kompetensi Carbon Accounting ISO 14064.2 dan ISO 14064.3 pada Triwulan II 2024. Peserta yang akan mengikuti adalah pengelola atau Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) baik pengelola kawasan konservasi nasional (KKN) maupun kawasan konservasi daerah (KKD) yang kawasan konservasinya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Kelautan

Pada Triwulan II 2024, Direktorat KEBP telah menyelenggarakan Pembentukan Kelompok Kerja Peningkatan Kapasitas beserta Gugus Tugasnya tanggal 25-26 Juni 2024 dan Pelatihan Analisis Data Neraca Sumber Daya Laut pada tanggal 27-28 Juni 2024 di Jakarta.

5. Pengembangan Sistem Data Kawasan Konservasi

Salah satu aspek penting yang mendukung dalam pengelolaan Kawasan Konservasi adalah tersedianya data dan informasi konservasi yang akurat, mudah diakses oleh publik dan dapat digunakan sebagai bahan yang membantu dalam proses pengambilan keputusan kebijakan (Decision Support System). Saat ini Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan sudah memiliki sistem database konservasi (SIDAKO) berbasis website yang dapat diakses melalui alamat <https://sidakokkhl.kkp.go.id> Data dan informasi yang tersedia dalam sistem database tersebut terdiri dari data kawasan konservasi, jenis ikan yang dilakukan upaya konservasi, pemanfaatan kawasan konservasi yang terkoneksi dengan aplikasi seapark, data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan data kelompok penggiat konservasi.

Pada tahun 2024 akan dilakukan beberapa kegiatan pengembangan untuk terus menyediakan data konservasi yang lebih luas dan akurat (Big Data) serta meningkatkan performa dari situs atau website SIDAKO ini. kedepan SIDAKO akan menyediakan Dashboard Modelling Analisis Ekosistem, Alert System, Dashboard Neraca Sumber Daya Laut, dan beberapa rancangan database spasial dan tabular. Untuk mewujudkan Sistem Data atau Big Data Conservation yang valid dan termutakhirkan akan dilakukan beberapa kegiatan kolaborasi dan kerjasama baik itu antar Kementerian Lembaga atau Mitra Konservasi. Selain itu, untuk memperkuat fundamental baik dari sisi keamanan data dan kemudahan mengakses website. Developer akan melakukan kegiatan pembelajaran di beberapa Negara yang sudah memiliki database atau website tentang konservasi yang terintegrasi dan powerful. Berikut merupakan tampilan atau laman dari Website SIDAKO



Gambar 13. Laman website SIDAKO (Sistem Database

Pada laman tersebut user bisa melihat atau mengakses beberapa data mulai dari data perihala Kawasan Konservasi yang berisikan capaian kawasan konservasi, kewenangan pengelolaan, ekosistem pesisir kawasan, status pengelolaan, target konservasi dan informasi terkait EVIKA. Lalu untuk konservasi jenis bisa didapatkan data terkait prioritas jenis ikan, monitoring hiu dan pari, dan EPANJI. Untuk pemanfaatan konservasi dan jenis sudah terintegrasi dengan informasi SAJI dan pemanfaatan konservasi atau SEAPARK. Selanjutnya kemitraan berisikan data-data mitra yang sudah memiliki PKS dengan Direktorat KEBP serta data kompak yang menampilkan kelompok - kelompok yang sudah mendapatkan bantuan anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi. Terakhir SIG bisa digunakan untuk melihat sebaran Kawasan Konservasi yang ada di Indonesia baik itu yang sudah ditetapkan maupun yang masih dicadangkan lengkap dengan fitur zonasi kawasannya.

Pada Tahun 2024 rencana kegiatan terkait pengembangan sistem data kawasan konservasi akan dilakukan pengutan data dalam hal pengaplikasian Tabel Andalusia dan penambahan data peta KK dalam peta pelayaran yang akan dilkordinasikan dengan PUSHIDROSAL.

Pada Triwulan II Tahun 2024, Direktorat KEBP telah melaksanakan beberapa kegiatan dan pertemuan dalam hal penguatan website SIDAKO yaitu, Rapat Pembahasan dan Analisis Usulan Penetapan Alur Pelayaran di Kawasan Konservasi tanggal 11-12 Juni 2024.

Tabel 11. Capaian IKU Luas Kawasan konservasi yang operasional (Juta Ha) Triwulan II Tahun 2024

SK.3		Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Berkelanjutan											
IKU - 4		Luas Kawasan Konservasi yang operasional(Juta Ha)											
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	-	-	Perhitungan dilaksanakan tahunan				17,8	-	-	-	-	-	-

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024
 Pada tahun 2024, Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan ditargetkan seluas 17,8 juta ha dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan II.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023
 Capaian Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023, karena IKU ini ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP adalah 20 juta ha. Capaian kinerja Triwulan I 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Renstra DJPRL Capaian kinerja Triwulan II 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL (17,8 juta ha), karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Secara Berkelanjutan ini didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu, beberapa kawasan konservasi didampingi oleh Mitra/LSM yang mempunyai concern terhadap pengelolaan kawasan konservasi.

b. Kendala

- 1) Kebijakan nasional dalam penyesuaian anggaran
- 2) Keterbatasan anggaran untuk operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi
- 3) Kendala cuaca serta jarak tempuh lokasi titik survei, peralatan survei, penyamaan waktu dan jadwal tim survei lapang dan tim Direktorat KEBP

b. Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah:

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan secara virtual dan bila memungkinkan dilakukan pertemuan langsung secara terbatas dengan pihak-pihak terkait sebagai bagian monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.
- 2) Bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan mitra dalam melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi sumberdaya dalam hal anggaran bahwa operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi dilakukan bersama dengan instansi/kementerian terkait dan mitra kerja DJPRL.

7. Kegiatan Pendukung

- a) Konsultasi Pakar dalam rangka Penyusunan Panduan Pengembangan Kawasan Konservasi tanggal 2 April 2024
- b) Pembahasan Laporan Cost Benefit Analysis for MPA Vision 30x45 tanggal 3 April 2024
- c) Pembahasan Materi National Determined Contribution (NDC) terkait Kawasan Konservasi dan muatan norma Result Based Payment (RBP) tanggal 23 April 2024
- d) Pertemuan Pembahasan Revisi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi tanggal 8 Mei 2024

- e) Survei Analisis Sumber Daya Kawasan Konservasi di Desa Komodo tanggal 7-10 Mei 2024
- f) Pendampingan Survei dan Koordinasi Rencana Implementasi Asuransi Terumbu Karang di Nusa Penida dan Denpasar tanggal 7-8 Mei 2024
- g) Pembahasan Materi National Determined Contribution (NDC) terkait Kawasan Konservasi dan muatan norma Result Based Payment (RBP) tanggal 14 Mei 2024
- h) Rapat Koordinasi Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut tanggal 15 Mei 2024
- i) Survei kegiatan pengambilan data Neraca Sumber Daya Laut (data sosial ekonomi dan biofisik) di Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kapoposang tanggal 13-23 Mei 2024 dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional TNP Laut Sawu di Kupang tanggal 27 Mei – 5 Juni 2024, di Rote tanggal 14-23 Mei 2024
- j) Penyusunan Panduan Praktis Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca di dalam Kawasan Konservasi tanggal 16 Mei 2024
- k) Rapat Pembahasan RSNI Neraca Sumber Daya Laut tanggal 20 Mei 2024
- l) Rapat Tim Penilaian EVIKA 2024 tanggal 29 - 30 Mei 2024
- m) Paparan Kajian Penerapan BLU pada LKKPN Pekanbaru tanggal 30 Mei - 1 Juni 2024
- n) Pengumpulan Data Dukung Penilaian EVIKA oleh Tim Penilai tanggal 3 Juni 2024
- o) Pertemuan Pemaparan Hasil Survei Rencana Implementasi Asuransi Terumbu Karang tanggal 4 Juni 2024
- p) Persiapan dan Pembahasan Hal Teknis Simposium Internasional Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi tanggal 3 Juni 2024
- q) Persiapan Survei Blue Carbon di Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu tanggal 6 Juni 2024
- r) Pembahasan dan Analisis Usulan Penetapan Alur Pelayaran di Kawasan Konservasi tanggal 11-12 Juni 2024
- s) High Integrity Blue Carbon Market Technical Workshop tanggal 11-14 Juni 2024
- t) Pembahasan Kelayakan Penerapan BLU pada LKKPN Pekanbaru tanggal 14 Juni 2024
- u) Pertemuan Konsensus RSNI Neraca Spasial tanggal 14 Juni 2024
- v) Kegiatan Survei Pengumpulan Data Blue Carbon Seagrass di Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu tanggal 21-28 Juni 2024
- w) Koordinasi Pembentukan SUOP dan Kelembagaan Kawasan Konservasi Provinsi Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Papua Barat, dan Papua Barat Daya bersama dengan Mitra Konservasi tanggal 24 Juni 2024
- x) Pembentukan Kelompok Kerja Peningkatan Kapasitas beserta Gugus Tugasnya tanggal 25-26 Juni 2024
- y) Bimbingan Teknis Analisis Data Neraca Sumber Daya Laut tanggal 27-28 Juni 2024

8. Realisasi Anggaran

Tabel 12. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan konservasi yang operasional (Juta Ha) Triwulan II Tahun 2024

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Evaluasi Eektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	771.000.000	23.403.972	3,04
2.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi	651.200.000	206.442.782	31,70
3.	Sistem Monitoring dan Pelaporan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Website	301.860.000	95.315.697	31,58
4.	Tata Kelola Lalu Lintas Pelayaran dan Peta Laut di Kawasan Konservasi	200.000.000	16.420.000	8,21
5.	Konsultasi Publik Kawasan	260.000.000	-	-
6.	Penyusunan Neraca Sumber Daya Laut	440.060.000	259.800.039	59,04
7.	Analisis Nilai Sumberdaya	882.000.000	405.531.262	45,98
8.	Penyusunan Neraca Karbon-PNBP	683.000.000	90.739.945	13,29
9.	Penyusunan Tabel Andalusia-PNBP	395.000.000	92.057.905	23,28
10.	Pembentukan Badan Layanan Umum	200.380.000	-	-
11.	Penyusunan dan Pelaksanaan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi	400.000.000	113.031.843	28,26
Jumlah		5.185.000.000	1.302.743.445	25,13

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

- a) Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) di 117 kawasan konservasi.
- b) Launching Produk *Ocean Account* / Neraca Sumber Daya Laut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- c) Simposium Internasional Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.



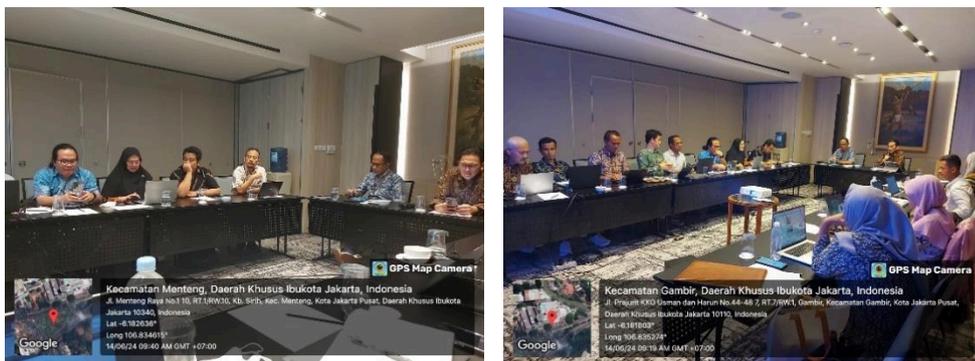
Gambar 14. Rapat Koordinasi Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi



Gambar 15. Rapat Koordinasi Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut



Gambar 16. Bimbingan Teknis Analisis Data Neraca Sumber Daya Laut



Gambar 17. Pembahasan Kelayakan Penerapan BLU pada LKKPN Pekanbaru

IKU 5. Luas Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan

Kebijakan aktifitas pemanfaatan di dalam kawasan konservasi perairan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Pemanfaatan kawasan konservasi dilakukan untuk kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan, pendirian dan/atau penempatan bangunan laut, pemanfaatan air laut selain energi, transportasi perairan, dan pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan. Ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi dalam pelaksanaan setiap kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi disusun berdasarkan kategori dan zonasi kawasan konservasi selain itu diatur dalam Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) masing-masing kawasan konservasi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan konservasi. Kawasan konservasi perairan berfungsi melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati laut dan jasa ekosistem, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonominya untuk kepentingan mata pencaharian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan konservasi. Kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah kawasan konservasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan untuk mewujudkan pemanfaatan secara berkelanjutan didalam kawasan konservasi.

Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan mendukung pemanfaatan kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 17,8 juta Hektare melalui kegiatan: 1) penyusunan regulasi pemanfaatan kawasan konservasi, 2) Pengembangan Pemanfaatan Potensi Kawasan Konservasi, 3) Pengembangan Sistem Perizinan Terintegrasi Kawasan Konservasi, 4) Pelayanan Perizinan Berusaha Kawasan Konservasi, dan 5) Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi.

Tabel 13. Capaian IKU Luas Kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan Triwulan II Tahun 2024

SK.3 Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Berkelanjutan													
IKU - 5 Luas Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan(Juta Ha)													
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	-	-	Perhitungan dilaksanakan tahunan				17,8	-	-	-	-	-	-

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada tahun 2023, Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan ditargetkan seluas 17,8 juta ha dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan II.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023
Capaian Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023, karena IKU ini ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP adalah 20 juta ha. Capaian kinerja Triwulan II 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Renstra DJPRL
Capaian kinerja Triwulan II 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL (17,8 juta ha), karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a) Analisis Keberhasilan
IKU luas kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemanfaatan kawasan konservasi yang berkelanjutan. Beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu
 - 1) Pencatatan data pemanfaatan kawasan dan tabulasi data pemanfaatan kawasan;
 - 2) Sosialisasi dan pendataan pemanfaatan kawasan konservasi dalam kegiatan rakernis di Semarang;
 - 3) Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi secara berkelanjutan dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat Pesisir;
 - 4) Pemeliharaan SEAPARK;
 - 5) Monitoring seapark dan pembahasan pengembangan seapark yaitu integrasi dengan sidako dan penanaman logik daya dukung;
 - 6) Persiapan dan koordinasi pelayanan perizinan, pelayanan gerai di gili matra untuk percepatan perizinan, pelayanan perizinan kepada pelaku usaha;
 - 7) NSPK Pemanfaatan Kawasan Konservasi berupa Perubahan Kepdirjen 34, Perubahan Kepdirjen 35, Perubahan Permen 47, Perubahan Permen 14, Petunjuk Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Konservasi, Konsultasi Publik PERMEN 14 Tahun 2016, Perubahan PP 85 Tahun 2021 untuk Muatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi, Perubahan PP 5 Tahun 2021 untuk Muatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi, Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi kepada Pengelola Kawasan Konservasi
 - b) Kendala
Kendala yang dihadapi yaitu

- 1) Kekurangan SDM terutama Ahli Pemetaan (GIS).
- 2) Kekurangan SDM dalam pelayanan perizinan berusaha SIUPKK.
- c) Solusi yang telah dilakukan adalah:
 - 1) Menyiapkan SDM untuk proses Penerbitan Perizinan untuk mengawal paraf pejabat eselon I lingkup KKP sampai di tanda tangani oleh MKP.
 - 2) Koordinasi dengan pegawai yang bisa melakukan pemetaan untuk membuat Peta dalam penerbitan izin usaha berupa SIUPKK.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
 Efisiensi sumberdaya dalam hal anggaran bahwa operasionalisasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi dilakukan bersama dengan instansi/kementerian terkait dan mitra kerja DJPKRL.
7. Kegiatan pendukung
 Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan pada Triwulan II 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. Kolaborasi bersama mitra (kolektif) dalam pemilihan penerima hibah untuk pendampingan desa.
 - b. Narasumber pada sosialisasi perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Provinsi Kalimantan Timur.
8. Realisasi anggaran

Tabel 14. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan(Juta Ha) Triwulan II Tahun 2024

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Pembinaan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	474.256.000	237.236.923	50,02
2.	Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi-PNBP	678.307.000	143.139.800	21,10
3.	Pemeliharaan SEAPARK	100.000.000	34.615.350	34,62
4.	Pengembangan SEAPARK-PNBP	396.505.000	19.230.000	4,85
5.	Pelayanan Perizinan Berusaha Kawasan Konservasi	300.932.000	54.822.796	18,22
6.	Penyusunan Materi Muatan Terkait Pemanfaatan Kawasan Konservasi	700.000.000	254.218.004	36,32
7.	Bimtek Pemanfaatan Kawasan Konservasi-PNBP	300.000.000	56.788.000	18,93
8.	Dukungan Pelayanan Perizinan	297.512.000	32.400.000	10,89
9.	Pelayanan Perizinan-PNBP	152.488.000	23.288.950	15,27

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
Jumlah		3.400.000.000	855.739.823	25,17

9. Rencana aksi Triwulan III Tahun 2024
 - a) Penyusunan NSPK terkait Pemanfaatan Kawasan Konservasi.
 - b) Perawatan dan Pengembangan SEAPARK.
 - c) Melakukan Pendampingan berupa sosialisasi dan Koordinasi terkait Perizinan dan data Pemanfaatan Kawasan Konservasi.
 - d) Pelayanan Perizinan Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi.
 - a. Rapat dengan Kemendagri terkait regulasi perizinan di KKD.

IKU 6. Rekomendasi Konvensi Internasional yang Disepakati dan Ditindaklanjuti (Dokumen)

Konvensi merupakan kesepakatan internasional antara pemerintah Indonesia dengan Lembaga/Negara lain untuk membentuk Kerjasama dibidang Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan.

Teknik menghitung : Jumlah konvensi internasional yang di ikuti yang menghasilkan rekomendasi yang disepakati dan ditindaklanjuti

Tabel 15. Capaian IKU Rekomendasi Konvensi Internasional yang Disepakati dan Ditindaklanjuti Triwulan II Tahun 2024

SK.4		Meningktanya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif										
IKU - 6		Rekomendasi Konvensi Internasional yang Disepakati dan Ditindaklanjuti(Dokumen)										
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	Perhitungan dilaksanakan tahunan				6	-	-	-	-	-

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024
 Penghitungan capaian dilakukan secara tahunan, namun sudah terdapat capaian pada triwulan II yaitu :
 - a) Implementasi konvensi KHL CTI-CFF.
 - b) Kesepakatan implementasi konvensi KHL BILATERAL RI-AS.
 - c) Implementasi konvensi REGIONAL Seafdec.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023
Capaian Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023, karena IKU ini ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
Capaian sejalan dengan target RPJMN dalam rangka mendukung peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan, terutama di kawasan konservasi serta sejalan dengan target global konvensi keanekaragaman hayati Kuning-Montreal *Global Biodiversity Framework*.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Renstra DJPRL
Sejalan dengan target dalam renstra DJPRL dalam memperkuat peran dan pemanfaatan posisi KKP dalam konvensi keanekaragaman hayati laut seperti CBD, CITES, CTI-CFF, dan kerja sama bilateral, regional dan multilateral lainnya.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
Keberhasilan pencapaian membutuhkan koordinasi yang baik antar Kementerian/Lembaga Terkait
 - b. Kendala
 - 1) Keterbatasan staf dan sumber daya
 - 2) Memerlukan waktu dalam pencapaian kesepakatan
 - c. Solusi
 - 1) Penambahan staf dan simplifikasi proses administrasi kegiatan
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Dit. KKHL didukung oleh mitra NGO, Universitas, dan K/L terkait melakukan koordinasi, dan pembahasan.
7. Kegiatan Pendukung
Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2024 yaitu:
 - a) Pembahasan SEAFDEC terkait konservasi keanekaragaman hayati laut.
 - b) Penyiapan bahan regional meeting dengan FAO.
 - c) Pembahasan draft kerjasama TFCAA dan perbaikan substansi kesepakatan RI-AS.
 - d) Penandatanganan kerjasama TFCCA.
 - e) Pelaksanaan regional meeting dengan FAO terkait *Global Biodiversity Plan*.
8. Realisasi anggaran

Tabel 16. Realisasi Anggaran IKU Rekomendasi Konvensi Internasional yang Disepakati dan Ditindaklanjuti Triwulan II Tahun 2024

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Evaluasi Implementasi Konvensi Konservasi Kawasan	881.500.000	217.869.170	24,72
2.	Penyusunan Kertas Posisi dan/atau Laporan Konvensi Konservasi	220.000.000	11.222.000	5,10
3.	Diseminasi Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	698.500.000	174.458.296	24,98
Jumlah		1.800.000.000	403.549.466	22,42

9. Rencana aksi Triwulan III Tahun 2024
 - a) Mengikuti kegiatan pertemuan *Animal Committee CITES*
 - b) Koordinasi pelaksanaan pertemuan kegiatan Pokja MPA dan Pokja *threatened species*
 - c) Pelaksanaan kegiatan *Global Ocean Account Partnership*
 - d) Pembahasan kerja sama bilateral, regional dan multilateral lainnya

IKU 7. Kesepakatan Jejaring, Kemitraan, dan Kerjasama Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (Kesepakatan)

Jejaring kawasan konservasi Perairan merupakan kerja sama pengelolaan dua atau lebih kawasan konservasi perairan secara sinergis yang memiliki keterkaitan biofisik, sosial ekonomi, dan budaya. Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan dalam mengelola kawasan konservasi nasional. Kerjasama merupakan kesepakatan antara KKP/Ditjen PRL dengan instansi/BUMN/Masyarakat dibidang Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan di luar kawasan konservasi.

IKU ini dihitung pada periode akhir tahun anggaran 2023 dengan metode penghitungan yaitu jumlah dokumen kesepakatan atau perjanjian jejaring, kemitraan, dan kerjasama antara KKP (Ditjen PRL/Dit. KKHL/UPT DJPRL) dengan mitra yang memuat program dan kegiatan kolaboratif yang mendukung pengelolaan efektif kawasan konservasi perairan yang berjumlah 5 dokumen kerja sama/ kemitraan/ jejaring.

Tabel 17. Capaian IKU Kesepakatan Jejaring Kemitraan dan Kerjasama Konservasi dan Keanekaragaman hayati Laut yang Disepakati(Kesepakatan)Triwulan II Tahun 2024

SK.4 Meningkatkan Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif												
IKU - 7 Kesepakatan Jejaring Kemitraan dan Kerjasama Konservasi dan Keanekaragaman hayati Laut yang Disepakati(Kesepakatan)												
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd	Target 2024	% Capaian thd	Target 2024	% Capaian thd

								Target PK		target Renstra		target Renstra	
-	-	-	Perhitungan dilaksanakan tahunan				5	-	-	-	-	-	-

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024
 Penghitungan capaian dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan II
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023
 Capaian Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023, karena IKU ini ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
 Capaian sejalan dengan target RPJMN dalam rangka mendukung peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan, terutama di kawasan konservasi.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Renstra DJPRL
 Sesuai dengan target dalam renstra DJPRL yaitu target pengembangan kerjasama, kemitraan, dan jejaring konservasi keanekaragaman hayati laut untuk periode 2020-2024 akan difokuskan dalam: (1) membentuk jejaring kerjasama konservasi perairan; (2) membentuk kemitraan pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional dengan masyarakat, swasta, lembaga swadaya masyarakat, filantropi dan lembaga penelitian; dan (3) membentuk kerjasama pengelolaan konservasi jenis ikan dilindungi dan terancam.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
 Keberhasilan didukung oleh kesepakatan mitra dalam pembentukan jejaring, kemitraan, dan kerjasama Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan. Selain itu, komitmen mitra dalam perwujudan kesepakatan dalam pengelolaan kawasan konservasi sangat diperlukan.
 - b. Kendala
 Kesepakatan Jejaring, Kemitraan, dan Kerjasama konservasi keanekaragaman hayati laut dibentuk berdasarkan kebutuhan Para Pihak yang masing-masing memerlukan kontribusi pihak lainnya demi tercapainya pengelolaan kawasan konservasi yang efektif. Akan tetapi dalam pencapaian kesepakatan tersebut terdapat beberapa kendala. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi diantaranya:
 - 1) Kesepakatan antara para pihak yang terlibat membutuhkan waktu dalam pembahasan untuk menyamakan persepsi dan rencana kerja para pihak.
 - 2) Pihak pejabat penandatanganan yang belum definitif atau pergantian struktur organisasi dapat memperpanjang proses penandatanganan kesepakatan jejaring, kemitraan, dan kerjasama konservasi keanekaragaman hayati laut.

- 3) Adanya *refocussing* anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilakukan.
 - c. Solusi
 Adapun solusi yang diupayakan terkait dengan pencapaian yaitu:
 - 1) Pertemuan pembahasan dan koordinasi dilakukan secara daring dalam rangka percepatan kesepakatan jejaring, kemitraan, dan kerjasama konservasi keanekaragaman hayati laut.
 - 2) Proses penandatanganan dilakukan secara *desk to desk* setelah para pihak menyetujui hal-hal terkait kesepakatan jejaring, kemitraan, dan kerjasama konservasi keanekaragaman hayati laut.
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
 Dit. KKHL bersama dengan UPT lingkup DJPRL melakukan koordinasi, kunjungan lapang dan pembahasan, dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi, perguruan tinggi, dan NGO.
7. Kegiatan Pendukung
- a) Pembahasan kemitraan antara LKKPN Pekanbaru dan Sanari. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024 secara daring
 - b) Pertemuan SMERU. Pertemuan dilaksanakan tanggal 20 Mei 2024 di RR Mangkai, GMB 3 Lantai 9
 - c) Pertemuan Kemitraan BKKPN Kupang dan YPP. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024 secara daring
 - d) Pertemuan Jejaring Papua Barat Daya. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024 secara daring
 - e) Pertemuan YPL Rencana Kerja TA 2024. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2024.
 - f) Pemantauan dan evaluasi lapang implementasi Kesepakatan Bersama antara KKP dan Yayasan WWF Indonesia tanggal 9-14 Juni 2024
8. Realisasi anggaran

Tabel 18. Realisasi Anggaran IKU Kesepakatan Jejaring Kemitraan dan Kerjasama Konservasi dan Keanekaragaman hayati Laut yang Disepakati(Kesepakatan) Triwulan I Tahun 2024

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Pembentukan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi	380.000.000	175.591.047	46,21
2.	Pembentukan Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi	202.800.000	43.892.730	21,64
3.	Pembentukan Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi	262.200.000	109.820.548	41,88
Jumlah		845.000.000	329.304.325	38,97

9. Rencana aksi Triwulan III Tahun 2024
 - a) Pertemuan inisiasi kerjasama dalam rangka percepatan kesepakatan.
 - b) Pendampingan Inisiasi Kerjasama.

IKU 8. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diverifikasi (Kelompok)

Bantuan pemerintah untuk konservasi merupakan bagian dari upaya percepatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan pengelolaan jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi. Bantuan pemerintah diberikan kepada kelompok masyarakat karena adanya keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki, sehingga perlu dilakukan kegiatan penyaluran bantuan konservasi dalam melakukan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan/atau pemanfaatan pada kawasan konservasi maupun jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi.

Sasaran bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yaitu kelompok yang melakukan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan/atau pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi, dengan target penerima sebanyak 20 (dua puluh) paket Bantuan Konservasi untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi menyusun pedoman teknis bantuan pemerintah konservasi, memberikan persetujuan hasil verifikasi usulan calon penerima bantuan pemerintah oleh UPT, memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan, dan mengkompilasi dan mendokumentasikan bantuan konservasi yang dilaksanakan oleh UPT, serta melakukan monitoring dan evaluasi.

Tabel 19. Capaian IKU Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi(KOMPAK) yang Diverifikasi(Kelompok) Triwulan II Tahun 2024

SK.5												
Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi												
IKU - 8												
Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi(KOMPAK) yang Diverifikasi(Kelompok)												
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
21	21	9	5	17	120	(4)	20	85	-	-	-	-

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024
 Sampai dengan Triwulan II tahun 2024 telah diterbitkan persetujuan identifikasi dan verifikasi kepada 9 kelompok penerima bantuan, dengan rincian:

- a) Surat persetujuan terhadap hasil identifikasi dan verifikasi kelompok penerima bantuan Nomor B.756/DJPRL.5/PRL.440/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024 kepada Kelompok Pandu Alam Sendulang.
 - b) Surat persetujuan terhadap hasil identifikasi dan verifikasi kelompok penerima bantuan Nomor B.751/DJPRL.5/PRL.440/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024 kepada Pokmaswas Desa Lewotobi, Pokmaswas Bua Lawah dan Pokmaswas Sumbawa Grow Up.
 - c) Surat persetujuan terhadap hasil identifikasi dan verifikasi kelompok penerima bantuan Nomor B.654/DJPRL.5/PRL.440/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024 kepada kelompok Pokmaswas Samudro Karang Jahe.
 - d) Surat persetujuan terhadap hasil identifikasi dan verifikasi kelompok penerima bantuan Nomor B.665/DJPRL.5/PRL.440/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024 kepada Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang.
 - e) Surat persetujuan terhadap hasil identifikasi dan verifikasi kelompok penerima bantuan Nomor B.619/DJPRL.5/PRL.440/III/2024 Tanggal 15 Maret 2024 kepada Kelompok Yayasan Lopie Bahari Nusantara.
 - f) Surat persetujuan terhadap hasil identifikasi dan verifikasi kelompok penerima bantuan Nomor B.537/DJPRL.5/PRL.440/III/2024 Tanggal 6 Maret 2024 kepada Kelompok Sangkarrang Ocean Dive dan Ok Dive Community.
 - g) Surat persetujuan terhadap hasil identifikasi dan verifikasi kelompok penerima bantuan Nomor B.805/DJPRL.5/PRL.440/IV/2024 Tanggal 5 April 2024 kepada Pokmaswas Bangkit Sehati, Pokmaswas Katora jaya dan Pokmaswas Sebelei.
 - h) Surat persetujuan terhadap hasil identifikasi dan verifikasi kelompok penerima bantuan Nomor B.806/DJPRL.5/PRL.440/IV/2024 Tanggal 5 April 2024 kepada Kelompok Gelora Kiabu dan KUB Damai Bahari.
 - i) Surat persetujuan terhadap hasil identifikasi dan verifikasi kelompok penerima bantuan Nomor B.807/DJPRL.5/PRL.440/IV/2024 Tanggal 5 April 2024 kepada Yayasan Beta Cinta Laut.
 - j) Surat persetujuan terhadap hasil identifikasi dan verifikasi kelompok penerima bantuan Nomor B.1087/DJPRL.5/PRL.440/V/2024 Tanggal 14 Mei 2024 kepada Pokmaswas Jaya Bahari.
 - k) Surat persetujuan terhadap hasil identifikasi dan verifikasi kelompok penerima bantuan Nomor B.1194/DJPRL.5/PRL.440/V/2024 Tanggal 21 Mei 2024 kepada Mandeh Blue Diving.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023 Capaian pada triwulan I tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena bantuan diberikan kepada kelompok yang berbeda setiap tahun.
 3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
Capaian sejalan dengan target RPJMN dalam rangka mendukung peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan, terutama di kawasan konservasi.
 4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja sejalan dengan target dalam Renstra DJPRL dalam rangka mendukung konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang efektif yang menjamin kelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan yang mensejahterakan rakyat.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Adapun dalam pencapaian target pada Triwulan II 2024 terdapat beberapa aspek yang mendukung keberhasilan, tetapi terdapat beberapa kendala/ permasalahan yang dihadapi dan solusi yang perlu diterapkan.

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan bantuan konservasi ditentukan oleh proses identifikasi dan verifikasi bantuan, serta pemanfaatan bantuan ke depan.

b. Kendala

Penyaluran bantuan KOMPAK memperoleh dukungan dari UPT DJPRL dalam pelaksanaan bantuan KOMPAK. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi diantaranya koordinasi, verifikasi, dan kelengkapan data.

c. Solusi

Adapun solusi yang diupayakan terkait dengan pencapaian yaitu:

1. Koordinasi dan persuratan/administrasi dilakukan secara daring dalam rangka percepatan penyaluran bantuan KOMPAK.
2. Serah terima bantuan KOMPAK yang tidak memungkinkan hadir secara langsung dihadiri secara online oleh Direktur KKHL dengan perwakilan UPT DJPRL berada di lapangan.
3. Dilakukan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan secara berkala.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Dit. KKHL dalam hal ini Kelompok Konvensi dan Jejaring Konservasi melakukan koordinasi dengan UPT lingkup DJPRL dalam hal teknis pelaksanaan, usulan calon penerima bantuan, verifikasi usulan, penetapan penerima bantuan, serah terima bantuan KOMPAK, serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan.

7. Kegiatan Pendukung

- a) Pertemuan Penyaluran Bantuan Konservasi TA 2024. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 1 April 2024 di Ruang Rapat Selaru, GMB III Lantai 8
- b) Bimbingan Teknis Pemanfaatan Bantuan Konservasi (KOMPAK). Bimbingan teknis dilaksanakan pada tanggal 13-17 Mei 2024 di Pandan Village, Mandeh, Sumatera Barat

8. Realisasi anggaran

Tabel 20. Realisasi Anggaran IKU Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi(KOMPAK) yang Diverifikasi(Kelompok) Triwulan II Tahun 2024

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Pembahasan NSPK	350.000.000	5.211.500	1,49

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
2.	Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK	97.500.000	32.098.630	32,92
3.	Pendampingan dan Pembinaan KOMPAK	527.500.000	345.505.022	65,50
Jumlah		975.000.000	382.815.152	39,26

9. Rencana aksi Triwulan III Tahun 2024
 - a) Verifikasi kelompok penerima bantuan
 - b) Pertemuan perkembangan penyaluran bantuan konservasi TA 2024 triwulan III

IKU 9. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau Dilindungi dan/atau Dilestarikan yang Meningkatkan Pengelolaannya (Jenis)

Jumlah Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, dan/atau Dilestarikan merupakan jumlah kumulatif Keanekaragaman Hayati Jenis prioritas yang diintervensi pengelolaannya sesuai dengan karakteristik Bioekologi untuk dilakukan perlindungan dan pelestarian guna menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan keanekaragaman hayati perairan.

Pada tahun 2024, target IKU sebesar 20 jenis. Dua puluh jenis prioritas tersebut adalah Hiu Apendiks CITES, Karang Hias, Hiu Berjalan, Sidat, Duyung, Banggai Cardinal Fish, Teripang, Hiu Paus, Terubuk, Penyu, Arwana, Belida, Cetacea, Pari Appendiks CITES, Napoleon, Kuda laut, Bilih, Pari Perlindungan Penuh, Kima-Lola, dan Bambu Laut-Akar Bahar yang diintervensi pengelolaannya terkait perlindungan dan pelestarian dengan karakteristik bioekologi guna menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan keanekaragaman hayati perairan melalui:

1. Penyediaan data informasi Jenis Ikan Dilindungi/ terancam punah
2. Pemulihan Populasi dan/atau pengayaan stok jenis ikan
3. Penanganan Biota Dilindungi/Terancam Punah
4. Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati perairan
5. Penilaian efektifitas pengelolaan jenis ikan
6. Penyadartahuan/Sosialisasi/Edukasi Stakeholder terkait perlindungan dan pelestarian Jenis Ikan prioritas
7. Bimbingan Teknis Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan

Tabel 21. Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau Dilindungi dan/atau Dilestarikan yang Meningkatkan Pengelolaannya (Jenis) Triwulan II Tahun 2024

SK.6	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan
-------------	--

IKU - 9		Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau Dilindungi dan/atau Dilestarikan yang Meningkatkan Pengelolaannya (Jenis)											
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPKRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	20	-	Perhitungan dilaksanakan tahunan				20	-	-	-	-	-	

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024
 Tidak ada capaian pada Triwulan II Tahun 2024, tidak memiliki target triwulan dan perhitungan dilakukan tahunan.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023
 Capaian Triwulan II Tahun 2024 Tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2023 karena tidak ada target dan penghitungan capaian IKU ini secara tahunan yaitu pada Triwulan IV Tahun 2024.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
 Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DJPKRL. Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Renstra DJPKRL
 Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPKRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya pada akhir tahun.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a) Keberhasilan
 Adanya dukungan dari mitra konservasi membantu dalam pelaksanaan kegiatan serta pencapaian IKU
 - b) Kendala:
 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana kegiatan, sehingga kegiatan tidak bisa berlangsung secara parallel. Selain itu, tidak adanya anggota yang memiliki keahlian GIS menghambat dalam penyajian IGT biota laut dilindungi.
 2. Ketersediaan waktu para pakar terkait dalam penyusunan NSPK yang sibuk.
 3. Proses penetapan SK Tim Penilai EPANJI Tahun 2024 oleh Keputusan Menteri, memakan waktu.
 4. Perbaikan juknis restocking dan penanganan biota belum disahkan oleh Keputusan Dirjen, sehingga beberapa Bimtek belum bisa dilaksanakan
 - c) Solusi yang telah dilaksanakan

1. Melakukan koordinasi, pembahasan dan pelaksanaan kegiatan melalui skema daring atau secara hybrid (luring dan daring).
 2. Bekerjasama dengan bagian hukum DJPKRL untuk pengesahan segera SK Tim Penilai EPANJI.
 3. Bekerjasama dengan bagian hukum DJPKRL untuk pengesahan Juknis oleh Kepdirjen PKRL.
 4. Melibatkan mitra konservasi dalam pelaksanaan kegiatan.
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring) maka penggunaan sumber daya dapat terlaksana secara efisien dan melibatkan banyak peserta dari berbagai wilayah
7. Kegiatan Pendukung
- a. Penyediaan data informasi Jenis Ikan Dilindungi/ terancam punah
Dalam rangka penyediaan data dan informasi jenis ikan, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyajian Informasi Geospasial Tematik (IGT) Biota Laut Dilindungi dan Keputusan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Jenis Ikan Dilindungi. Data dan Informasi tersebut akan dimuat dalam situs Sistem Informasi Database Konservasi (SIDAKO). Progres pelaksanaan penyediaan data dan informasi adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengumpulan data dan informasi jenis ikan dari UPT lingkup DJPKRL dan mitra konservasi. Data dan informasi yang dikumpulkan berupa data kemunculan, keterancam, keterdamparan, habitat penting, dan populasi dari 20 jenis prioritas konservasi tahun 2020-2024.
 - 2) Persiapan Bimbingan Teknis Pendataan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dilakukan pada tanggal 29 April 2024 di Jakarta. Rapat persiapan bertujuan untuk menentukan waktu, tempat, peserta, narasumber, dan agenda kegiatan Bimtek.
 - b. Pemulihan Populasi dan/atau pengayaan stok jenis ikan
Dalam rangka pemulihan populasi dan/atau pengayaan stok jenis ikan, pada triwulan II tahun 2024 telah dilakukan kegiatan pendukung sebagai berikut:
 - 1) Pembahasan penentuan jenis ikan prioritas konservasi tahun 2025-2029 pada tanggal 3 April 2024 di Depok. Hasilnya berupa pengelompokan 25 jenis prioritas konservasi berdasarkan hasil skoring menggunakan kriteria sebagai berikut:
 - a) IUCN: CR (3); EN (2); VU (1); DD (0)
 - b) CITES: App I (2); App II (1); App (0)
 - c) Endemisitas: Ya (1); tidak (0)
 - d) Tingkat Pemanfaatan (Kepmen KP 22): Tinggi/merah (3); Sedang/kuning (2); rendah (1); tidak ada (0)
 - e) Status perlindungan: Ada (1); belum ada (0)
 - f) Kemudahan dalam monitoring populasi; Susah (1); mudah (0)

- Daftar sementara 25 jenis prioritas sebagai berikut: Eksotis dan kharimatis, Marin dan Freshwater Ornamental Fish, Amfibi, Moluska laut, Krustacea, Teripang, Korall, Paus, Hiu appendiks CITES, Pari appendiks CITES, Hiu dan pari air tawar, Kuda laut, Penyu dan kura-kura, Napoleon, Sidat, Arwana, Terubuk, Belida, Bilih, Duyung, Mimi, Moluska perairan tawar, Lumba-lumba, Hiu laut dalam, dan Ikan endemic
- 2) Monitoring perkembangan Coral Stock Center (CSC) pada tanggal 3 Mei 2024 di Jakarta. Monitoring dilakukan untuk mengetahui capaian pembuatan CSC oleh masing-masing B/LPSPL di wilayah kerja. Hasilnya berupa matrik capaian CSC di 10 lokasi (Pulau Pusong-Aceh Barat Daya, Perairan Batu Kajang-Pesisir Selatan, Pulau Bokori-Konawe, Pantai Malalayang-Manado, Pulau Um-Sorong, Maratua-Berau, Sekotong-Lombok Barat, Taman Laut Pandanan-Lombok Utara, Pulau Lancang-Kep. Seribu, dan Pantai kembangranjang-Lebak)
 - 3) Pembahasan program konservasi ikan bilih di Danau Singkarak pada tanggal 2 Mei 2024 di Jakarta. Hasilnya berupa rekomendasi sebagai berikut:
 - a) Ikan bilih di danau singkarak perlu dilindungi secara terbatas berdasarkan ukuran ikan (tidak boleh ditangkap pada ukuran ikan 70-90 mm karena kondisi matang gonad dan alat tangkap (tidak menggunakan jaring berukuran <math><3/4</math> inci pada alat tangkap bagan dan gillnet)
 - b) Menjadikan daerah Sumpur, paninggahan, muara pingai, dan batu taba sebagai area konservasi ikan endemic Bilih
 - c) Melakukan pemulihan stok melalui kegiatan restocking dan rehabilitasi habitat ikan bilih
 - d) Melakukan pengaturan alat dan waktu penangkapan ikan
- c. Penanganan Biota Dilindungi/Terancam Punah
- Beberapa biota dilindungi (mamalia laut, penyu, hiu paus) sering mengalami kejadian keterdamparan atau bycatch. Untuk mengurangi ancaman kematian dan pemanfaatan ilegal akibat keterdamparan dan bycatch maka perlu dilakukan penanganan pada setiap kejadian keterdamparan dan bycatch yang bersifat incidental. Untuk memperbesar peluang keberhasilan penanganan dibutuhkan SDM yang terlatih. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 2024 dilakukan rapat persiapan Bimtek Penanganan Biota di Jakarta. Hasilnya berupa waktu, tempat, peserta, narasumber, dan agenda kegiatan Bimtek
- d. Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati perairan
1. Penyusunan RAN Konservasi Duyung pada tanggal 14 Mei 2024 di Bogor. Hasilnya berupa draft matrik RAN Konservasi Duyung periode 2025-2029.
 2. Penyusunan RAN Konservasi Kuda Laut pada tanggal 16 Mei 2024 di Jakarta. Hasilnya berupa draft matrik RAN Konservasi Kuda Laut periode 2025-2029
 3. Workshop inisiasi perlindungan hiu belimbing pada tanggal 20 Mei 2024 di Depok. Hasilnya berupa rumusan yang merekomendasikan perlunya penetapan status perlindungan ikan hiu belimbing.
 4. Monev implementasi RAN Konservasi Terubuk periode 2022-2024 pada tanggal 11 Juni 2024 di Bogor. Berdasarkan hasil monev implementasi RAN Konservasi Terubuk 2022-2024, dari 31 rencana aksi, sudah 22 (71%) rencana aksi yang telah dilaksanakan dan 9 (29%) rencana aksi belum dilaksanakan/on progress.

5. Monev implementasi RAN Konservasi BCF periode 2022-2024 pada tanggal 12 Juni 2024 di Bogor. Berdasarkan hasil monev implementasi RAN Konservasi BCF Tahun 2022-2024, sudah 75 % (23) Rencana Aksi yang telah dilaksanakan
 6. Penyusunan RAN Konservasi Cetacea pada tanggal 19 Juni 2024 di Bogor. Hasilnya berupa draft matrik RAN Konservasi Cetacea periode 2025-2029.
 7. Pembahasan analisis kebijakan perlindungan belida pada tanggal 20 Juni 2024 di Jakarta. Hasilnya berupa draft dokumen analisis kebijakan perubahan status perlindungan ikan belida yang merekomendasikan penurunan status ikan belida jawa dari dilindungi penuh menjadi dilindungi terbatas.
 8. Workshop penyusunan RAN Kima dan Lola pada tanggal 20-21 Juni 2024 di Semarang. Hasilnya identifikasi isu dan permasalahan konservasi kima dan lola, serta kebutuhan program konservasinya
 9. Pembahasan program konservasi dan spesies prioritas pada tanggal 21 Juni 2024 di Jakarta.
 10. Penyusunan draft Juknis Pendataan Bambu Laut, Akar Bahar, kima, dan lola pada tanggal 27-28 Juni 2024 di Makassar. Hasilnya berupa draft Juknis Pendataan Bambu Laut, Akar Bahar, kima, dan lola.
- e. Penilaian efektifitas pengelolaan jenis ikan
- Dalam rangka penilaian Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Jenis Ikan (EPANJI) Dilindungi dan/atau Appendiks CITES telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung sebagai berikut:
1. Penyusunan draft SK Tim Penilai EPANJI Tahun 2024 pada tanggal 2 April 2024 di Jakarta. Hasilnya berupa draft Kepmen KP tentang Penetapan Tim Penilai EPANJI 2024 yang beranggotakan 28 orang yang berasal dari KKP, BRIN, Barantin, FPIK IPB, FPIK Unri, FPIK Untad, FPIK Unsrat, FPIK Undip, WWF Indonesia, YKAN, YKCI, dan Rekam Indonesia.
 2. Reviu Petunjuk Teknis EPANJI pada tanggal 25-26 Juni 2024 di Makassar. Reviu dilakukan terhadap kriteria dan indikator penilaian pada Juknis EPANJI yang nantinya akan digunakan untuk penilaian 25 jenis prioritas konservasi 2025-2029.
 3. Monitoring dan evaluasi implementasi RAN Konservasi Penyu periode 2022-2024 pada tanggal 23 April 2023 di Semarang. Berdasarkan monev, capaian implementasi RAN Konservasi Penyu telah mencapai 100 %, artinya 22 rencana aksi dalam RAN Konservasi Penyu telah dilaksanakan. Capaian implementasi RAN ini meningkat sebanyak 14% bila dibandingkan dari tahun 2022. Namun demikian capaian 100% ini hanya dilaksanakan di sebagian lokasi prioritas dan belum terlaksana di lokasi lainnya, khususnya rencana aksi yang berkaitan dengan riset/kajian, peningkatan kapasitas SDM, pengawasan dan penegakan hukum.
- f. Penyadartahuan/Sosialisasi/Edukasi Stakeholder terkait perlindungan dan pelestarian Jenis Ikan prioritas
- Dalam rangka penyadartahuan, sosialisasi, dan edukasi jenis ikan dilindungi dan terancam punah, telah dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya
- 1) Simposium hiu dan pari ke-4 pada tanggal 21-22 Mei 2024 di Depok. Simposium yang bekerjasama dengan Pustek Kelautan FMIPA UI, WWF Indonesia, YKCI, dan USAID Kolektif. Simposium bertujuan untuk:

- a) Mengidentifikasi dan memahami habitat kritis bagi hiu dan pari di perairan Indonesia.
- b) Membahas tantangan terkini dalam pengelolaan hiu dan pari dan merumuskan strategi mitigasi.
- c) Menyusun langkah-langkah pemulihan populasi hiu dan pari.
- d) Mempertimbangkan aspek dimensi manusia dalam pengelolaan dan pelestarian hiu dan pari.

Simposium hiu dan pari berhasil mengumpulkan pemakalah yang berjumlah 102 orang dengan topik Pemahaman mendalam tentang habitat kritis; Pendekatan mitigasi untuk tantangan terkini; Pemulihan Populasi dan Upaya Konservasi; Mengintegrasikan dimensi manusia (pengaruh dan dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem dan spesies yang dilibatkan)

- 2) Bimtek Pendataan dan Restocking Jenis Ikan Napoleon dan Kuda Laut pada tanggal 27-29 Mei 2024 di Belitung. Bimtek dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan Keputusan Dirjen PKRL No. 2 Tahun 2024 tentang Juknis Pendataan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES. Berdasarkan hasil pretes dan postes Bimtek Pendataan dan Restocking Ikan Napoleon menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, yakni dari nilai rata-rata pretes sebesar 53 meningkat menjadi nilai rata-rata postes sebesar 72,86 (meningkat 37 %).
- g. Bimbingan Teknis Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan
 Dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai di Lingkup UPT Ditjen PKRL, Pemerintah Daerah, Stakeholder terkait biota perairan dilindungi, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penanganan Mamalia Laut Terdampar pada tanggal 5-6 Juni 2024 di Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil pre-tes dan post-tes, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta sebesar 68% dilihat dari nilai rata-rata pre-test dan post-test. Peserta bimtek sepakat membentuk jejaring penanganan mamalia laut terdampar di Kalimantan Barat dengan menandatangani berita acara.

8. Realisasi Anggaran

Tabel 22. Realisasi Anggaran IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau Dilindungi dan/atau Dilestarikan yang Meningkatkan Pengelolaannya (Jenis) Triwulan II Tahun 2024

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	426.306.000	168.023.846	39,41
2.	Pemulihan Populasi dan/atau Pengayaan Stok Jenis Ikan	498.200.000	77.036.940	15,46
3.	Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah	400.000.000	12.430.000	3,11

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
4.	Edukasi dan Sosialisasi Perlindungan Keanekaragaman Hayati Perairan	700.000.000	218.038.276	31,15
5.	Evaluasi Keanekaragaman Hayati Perairan Dilindungi/Terancam Punah	300.000.000	61.816.957	20,61
6.	Bimtek Perlindungan dan Pelestarian Jenis	200.000.000	60.025.553	30,01
7.	Bimtek Perlindungan dan Pelestarian Jenis-PNBP	250.000.000	-	-
8.	Penyusunan NSPK Perlindungan/Pelestarian Keanekaragaman Hayati Perairan	800.000.000	168.724.357	21,09
Jumlah		3.574.506.000	766.095.929	21,43

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

- a) Reviu dan Penyusunan RAN Konservasi Jenis Ikan
- b) Pengumpulan dan verifikasi data jenis ikan dilindungi
- c) Pengumpulan data dukung dan Penilaian EPANJI Tahun 2024
- d) Penyusunan dan Pembahasan Juknis Pendataan Jenis Ikan Dilindungi
- e) Bimtek Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan
- f) Pembahasan draft analisis kebijakan penetapan status perlindungan jenis ikan
- g) Sosialisasi dan edukasi biota perairan dilindungi



Gambar 18. Simposium Hiu dan Pari ke-4 Di Depok



Gambar 19. Bimtek Pendataan dan Restocking Ikan Napoleon dan Kuda Laut di Belitung



Gambar 20. Bimtek Penanganan Mamalia Laut Terdampar di Kalbar



Gambar 21. Reviu Juknis EPANJI di Makassar



Gambar 22. Penyusunan Juknis Pendataan Bambu Laut, Akar Bahar, Kima, dan Lola di Makassar

IKU 10. Jenis Keanekaragaman Hayati yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang Dikelola Pemanfaatannya secara Berkelanjutan (Jenis)

Upaya pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang difasilitasi pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya. Penghitungan capaian kinerja ini dilakukan dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendix CITES dan/atau *look alike species* yang difasilitasi upaya pemanfaatannya melalui:

- a. penyusunan regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES
- b. pengembangan sistem pelayanan pemanfaatan jenis ikan
- c. pengembangan sumber daya manusia pelayanan pemanfaatan jenis ikan
- d. sosialisasi regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES
- e. pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau *look alike species*.

Jumlah kumulatif Keanekaragaman Hayati yang dilayani pemanfaatannya 9 Jenis, yaitu :

1. Hiu Appendiks (*Alopias superciliosus*, *Alopias pelagicus*, *Carcharhinus albimarginatus*, *Carcharhinus altimus*, *Carcharhinus amboinensis*, *Carcharhinus amblyrhynchos*, *Carcharhinus leucas*, *Carcharhinus obscurus*, *Carcharhinus plumbeus*, *Carcharhinus brevipinna*, *Carcharhinus limbatus*, *Carcharhinus longimanus*, *Carcharhinus falciformis*, *Isurus oxyrinchus*, *Isurus paucus*, *Negaprion acutidens*, *Prionace glauca*, *Sphyrna lewini*, *Sphyrna mokarran*, *Sphyrna zygaena*, *Carcharhinus amblyrhynchoides*, *Carcharhinus melanopterus*, *Carcharhinus sorrah*, *Eusphyra blochii*, *Lemiopsis tephrodes*, *Triaenodon obesus*, *Carcharhinus borneensis*, *Carcharhinus sealei*, *Carcharhinus tjtjtjot*, *Carcharhinus macloti*, *Loxodon macrorhinus*, *Rhizoprionodon spp.*, *Scoliodon macrorhynchus*)
2. Pari Appendiks (*Mobula spp.*, *Glaucostegus typus*, *Glaucostegus thouin*, *Rhynchobatus australiae*, *Rhynchobatus springeri*, *Rhynchobatus laevis*, *Rhina ancylostoma*)
3. Banggai Cardinal Fish (*Pterapogon kauderni*)
4. Sidat (*Anguilla anguilla*, *Anguilla bicolor*, *Anguilla celebensis*, *Anguilla interioris*, *Anguilla marmorata*)
5. Napoleon (*Cheilinus undulatus*)
6. Arwana (*Scleropages formosus*, *Scleropages inscriptus*, *Scleropages jardini*)
7. Kuda Laut (*Hippocampus spp*)
8. Jenis ikan appendiks yang sebaran alaminya tidak di Indonesia : Pleco Zebra (*Hypancistrus zebra*), Clarion Angelfish (*Holocanthus clarionensis*), pari hias air tawar (*Potamotrygon spp*)
9. Look alike species

Penghitungan capaian kinerja ini dilakukan dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendix CITES dan/atau *look alike species* yang difasilitasi upaya pemanfaatannya melalui: a) penyusunan regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendix CITES, b) pengembangan sistem pelayanan pemanfaatan jenis ikan, c) pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendix CITES, dan/atau *look alike species*

Tabel 23. Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang Dikelola Pemanfaatannya secara Berkelanjutan (Jenis) Triwulan II Tahun 2024

SK.7													
Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan													
IKU - 10													
Jenis Keanekaragaman Hayati yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang Dikelola Pemanfaatannya secara Berkelanjutan (Jenis)													
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	9	-	Perhitungan dilaksanakan tahunan				9	-	-	-	-	-	

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024
 Pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat capaian capaian pada Triwulan II Tahun 2024.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023
 Capaian Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023, karena tidak ada target triwulan dan penghitungan capaian IKU ini secara tahunan yaitu pada Triwulan IV Tahun 2024.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
 Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DJPKRL. Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Renstra DJPRL
 Capaian kinerja Triwulan I 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a) Analisis Keberhasilan
 Pelayanan Pemanfaatan Jenis Ikan sudah berjalan dengan menggunakan media online saji.kkp.go.id dan telah menerbitkan SAJI LN dan SIPJI untuk pelaku usaha pemanfaat jenis ikan
 - b) Kendala
 - 1) Kendala dalam ketersediaan dana dan metode pembayaran kegiatan.
 - 2) Dinamika kondisi di lapangan yang memerlukan penyusunan atau perbaikan terhadap NSPK Yang ada.
 - 3) Pemahaman terkait program dan regulasi yang telah tersedia terkait pengelolaan pemanfaatan jenis antara pihak terkait.

- 4) Kebutuhan pemutakhiran sistem pelayanan pemanfaatan untuk setiap jenis ikan yang dikelola pemanfaatannya.
- c) Solusi
Solusi yang telah dilakukan adalah:
 - 1) Pembayaran pelaksanaan kegiatan menggunakan skema lainnya (LS atau Kartu Kredit Pemerintah).
 - 2) Melakukan Penyusunan dan perbaikan NSPK agar dapat diimplementasikan di lapangan.
 - 3) Koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kegiatan secara virtual dan bila memungkinkan dilakukan pertemuan langsung secara terbatas dengan pihak-pihak terkait dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan mitra dalam melaksanakan pelayanan pemanfaatan jenis ikan.
 - 4) Pemutakhiran software pelayanan perizinan.
 - 5) Pendampingan implementasi NSPK kepada UPT.
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau *hybrid* (daring dan luring) maka penggunaan sumber daya dapat terlaksana secara efisien dan melibatkan banyak peserta dari berbagai wilayah
7. Kegiatan Pendukung
 - a) Pelayanan pemanfaatan jenis Ikan dilindungi, Appendiks CITES dan/atau spesies *look a Like*.
 - b) Penyusunan NSPK (contoh: Juknis / SOP) pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES.
 - c) Pelaksanaan pengumpulan data / survei dalam rangka penyusunan NSPK (contoh: Juknis / SOP/NDF) pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES.
 - d) Penetapan kuota pengambilan alam jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES.
 - e) Penetapan kuota ekspor tahap 1 jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES.
 - f) Penetapan kuota ekspor tambahan 1 jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES.
 - g) Koordinasi atau sosialisasi untuk stakeholders mengenai regulasi Pemanfaatan pemanfaatan jenis Ikan dilindungi, Appendiks CITES dan/atau spesies *look a Like* dan
 - h) Pemutakhiran Aplikasi e-SAJI (saji.kkp.go.id).
 - i) Pendampingan implementasi NSPK ke UPT.
8. Realisasi Anggaran

Tabel 24. Realisasi Anggaran IKU Jenis Keanekaragaman Hayati yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang Dikelola Pemanfaatannya secara Berkelanjutan (Jenis) Triwulan II Tahun 2024

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Penyusunan NSPK Pemanfaatan Jenis Ikan	300.000.000	150.024.464	50,01
2.	Penyusunan NSPK Pemanfaatan Jenis Ikan-PNBP	300.000.000	78.424.589	26,14
3.	Penyediaan Data Potensi dan Status Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	250.000.000	29.913.000	11,97
4.	Penyediaan Data Potensi dan Status Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES-PNBP	137.920.000	17.845.216	12,94
Jumlah		987.920.000	276.207.269	27,96

2. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

- a) Pelayanan pemanfaatan jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES.
- b) Penyiapan NSPK (contoh: Juknis / SOP/Kuota) pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES.
- c) Penetapan kuota tahap II.
- d) Penyusunan penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES;
- e) Koordinasi dan/atau sosialisasi kepada stakeholders.
- f) Pemutakhiran Aplikasi saji.kkp.go.id.
- g) Pendampingan implementasi NSPK ke UPT.



Gambar 23. Pembahasan Usulan Rekomendasi Usulan Kuota Pengambilan Charcharhinidae Uplisting COP19



Gambar 24. Petunjuk Teknis Pengambilan dari Alam



Gambar 25. Pembahasan Revisi Kuota Pengambilan



Gambar 26. Pendampingan Penataan Stok Uplisting Hiu



Gambar 27. Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan (Nusatic & Kontes Arwana)

IKM 11. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut(%)

Indikator Kinerja (IK) “**Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut(%)**” merupakan Sasaran Kegiatan Nomor 8 dalam *Manual IKU 11* Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan tahun 2023.

“Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)” adalah

suatu instrumen pendidikan yang digunakan untuk mengukur kemampuan Direktorat Perencanaan Ruang dalam melaksanakan realisasi keuangan.

Teknik menghitung capaian “Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)” menggunakan formula atau rumus sebagai berikut:

Tabel 25. Capaian IKM Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (%) Triwulan II Tahun 2024

SK.8													
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut													
IKU - 11													
Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut(%)													
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
28,28	97,15	9,72	18	27,30	120	(0,98)	95	28,74	-	-	-	-	

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Realisasi anggaran merupakan besaran realisasi belanja APBN dari pagu anggaran yang diberikan pada tahun anggaran berjalan. Pagu anggaran KEBP Tahun 2024 sebesar Rp 26.641.306.000,- (dua puluh enam milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah). Pada Triwulan II Tahun 2024, realisasi anggarannya adalah sebesar Rp 7.272.379.708,-. atau 27,30%

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023 Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 sebesar 27,30% atau terdapat penurunan sebesar 0,98% jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 28,28% dikarenakan adanya buka blokir pagu kegiatan LAUTRA sehingga prosentase realisasi menurun.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
Tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah karena pada Renstra KKP tidak terdapat IKU tersebut.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Renstra DJPRL
Tidak bisa dibandingkan dengan target Renstra DJPRL karena pada Renstra DJPRL tidak terdapat IKU tersebut
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan

Capaian Realisasi anggaran Direktorat KKHL pada Triwulan II sebesar 9,72%, hal ini sudah cukup baik karena TW II memiliki target 18% .

- b. Kendala
Dengan kondisi 1 DIPA di Direktorat Jenderal PRL, masih diperlukan koordinasi yang baik antara Direktorat sehingga terdapat keterlambatan proses administrasi baik sumber dana RM dan PNPB.
 - c. Solusi
Melakukan koordinasi intensif antara pengelola keuangan di masing-masing Direktorat/ Sekretariat Ditjen PRL.
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Kegiatan pada IKU 11 sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam penyelesaian capaian IKU nya, koordinasi dilakukan melalui komunikasi antara BP dan BPP.
 7. Kegiatan Pendukung
IKU 11 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan tidak memiliki kegiatan pendukung untuk mencapainya, tetapi pelaksanaannya didukung pada kegiatan Dukungan Manajemen.
 8. Realisasi Anggaran
Tidak ada data realisasi anggaran, karena tidak memiliki kegiatan pendukung.

IKM 12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (Indeks)

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Tabel 26. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (Indeks) Triwulan II Tahun 2024

SK.8	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
IK - 12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (Indeks)

Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
79,12	90,91	-	83	86,79	104,57	7,67	88	98,63	88			

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024
 Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024 (semester) adalah 86,79.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023
 Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 sebesar 86,79 atau terdapat kenaikan sebesar 7,67 jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 79,12.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
 Tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah karena pada Renstra KKP tidak terdapat IKU tersebut.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Renstra DJPRL
 Tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah karena pada Renstra DJPRL tidak terdapat IKU tersebut.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
 - 1) Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut atau Dit KEBP mengikuti kegiatan rapat kerja teknis (Rakernis) lingkup DJPRL dengan total 20JP, hal ini sangat mendukung pencapaian dalam IP ASN.
 - 2) Keaktifan pegawai mengikuti peningkatan kompetensi pegawai melalui Seminar, workshop, bimtek, sosialisasi, dan dialog kinerja. (contoh, sosialisasi kompetensi pegawai terkait Kawasan, jenis dan arsiparis).
 - 3) Tidak ada pegawai Dit KKHL yang mendapatkan hukuman disiplin.
 - b. Kendala
 Masih ada pegawai yang belum mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.
 - c. Solusi
 Mengingatkan di WA Group lingkup Dit KKHL
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
 Dalam rangka penggunaan sumberdaya, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada pada Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
7. Kegiatan Pendukung
 Kegiatan pendukung tidak ada

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tidak ada alokasi khusus untuk mendukung IKU ini

IKM 13. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (Nilai)

Deskripsi:

1. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.
2. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:
 - a. perencanaan kinerja (30%);
 - b. pengukuran kinerja (30%);
 - c. pelaporan kinerja (15%); dan
 - d. evaluasi kinerja (25%).

Teknik Menghitung:

- Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat dan Keanekaragaman Hayati Laut adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL.
- Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Predikat	Nilai	Interpretasi
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 27. Capaian IKM Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi dan Biota Perairan (Nilai) Triwulan II Tahun 2024

SK.8		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Konservasi dan Keaneekaragaman Hayati Laut											
IK - 13		Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi dan Biota Perairan (Nilai)											
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	81,05	Perhitungan dilaksanakan Tahunan				-	81		81				

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Target IK "Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Direktorat KKHL (Nilai)" tahun 2024 adalah 81. Sedangkan capaian IK "Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat PRL (Nilai)" pada Triwulan I tahun 2024 belum tercapai karena target perhitungan tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian kinerja Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2023, karena IK dihitung pada akhir tahun (secara tahunan).

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra) Capaian kinerja Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2023, karena targetnya tahunan dan tidak dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PRL karena tidak ada target untuk Rekonsiliasi Nilai Kinerja. Indikator ini tidak terdapat di dalam Renstra DJPRL 2020-2024 tetapi berkontribusi terhadap penilaian Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja DJPRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Renstra DJPRL Tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah karena pada Renstra DJPRL tidak terdapat IKU tersebut.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: (1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan, dan (2). Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial terkait dengan indikator kinerja "Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat KKHL (Nilai)"

b. Kendala

Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu: (1). Adanya keterbatasan dokumen untuk penilaian indikator kinerja "Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat KKHL (Nilai)", dan (2). Tidak seluruh staf di Eselon 2 mengetahui penilaian indikator ini.

c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: (1). Mengupayakan ketersediaan dokumen untuk penilaian indikator kinerja "Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat KKHL (Nilai)", dan (2). Perlu dilakukan sosialisasi untuk indikator ini sehingga setiap staf dapat membantu dalam penilaian.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung capaian Nilai PM SAKIP Direktorat KEBP antara lain

- a) Updating Aplikasi kinerja KKP.
- b) Updating emonev BAPPENAS.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tidak ada alokasi khusus untuk mendukung IKU ini

IKM 14. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (Dokumen)

SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dasar hukum Permen KP No.10/tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Teknik Menghitung:

Laporan SPIP Triwulan I s.d IV sesuai dengan format Permen KP No.10/PERMEN-KP/Tahun 2016 dengan melampirkan:

1. Form Pengendalian Rutin
2. Form Pengendalian Berkala
3. Form Monitoring Manajemen Risiko

Dokumen Manajemen Risiko (sebagai lampiran SPIP TW I)

Tabel 28. Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (Dokumen) Triwulan II Tahun 2024

SK.8		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut											
IK - 14		Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (Dokumen)											
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
2	4	1	2	2	100	-	4	50	4				

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024 :

Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024 adalah 2 dokumen dari target tahun ini yaitu 4 dokumen sehingga presentase capaiannya presentasenya 50%

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023
Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 adalah sama.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Renstra DJPRL
Capaian realisasi 2 dokumen jika dibandingkan dengan Dokumen Rencana Strategis DJPRL 2020-2024 yang memiliki target akhir 4 pada setiap tahunnya hingga Tahun 2024, maka presentase capaiannya 50%
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
Capaian realisasi 2 dokumen jika dibandingkan dengan Dokumen Rencana Strategis KKP 2020-2024 yang memiliki target akhir 4 pada setiap tahunnya hingga Tahun 2024, maka presentase capaiannya 50%
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Analisis Keberhasilan :
Analisis Keberhasilan IKU 14: • SPIP merupakan perhitungan evaluasi triwulan dengan capaian pada Triwulan II sudah tercapai dengan klaim Dokumen SPIP Triwulan I Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan 2024 telah diselesaikan tepat waktu sebelum 10 April 2024
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya :
Kegiatan pada IKU 14 sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam penyelesaian capaian IKU nya.
7. Kegiatan Pendukung
Kegiatan pendukung tidak ada
8. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran tidak ada alokasi khusus untuk mendukung IKU ini



Gambar 28. Pembahasan SPIP dan MR Triwulan I Tahun 2024

IKM 15. Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur sasaran strategis tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat KKHL yang handal dan mudah diakses, yaitu: Persentase unit kerja Direktorat KKHL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Sistem manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

1. Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.
2. Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 1 komponen, yaitu Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui portal *Collaboration Office*.

Cara menghitung nilai berdasarkan komponen dan pembobotan sebagai berikut:

1. Terdapat 1 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja berdasarkan sistem Manajemen Pengetahuan Level II ini, yaitu:
 - a. Keaktifan (bobot 100%): Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi target minimal mendapatkan 3 poin dan poin maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan
2. Pembobotan yang dimaksud antara lain:
 - a. Konten dokumentasi kegiatan rapat /seminar/ diseminasi dengan memenuhi unsur 5W 1H mendapatkan **poin 0,5**
 - b. Konten berupa infografis dengan **poin 1**
 - c. Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan **poin 3**
3. Cara Mengukur
 - a. Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (portal *Collaboration Office*)
 - b. Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian :
 - Keaktifan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan
 - Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
 - Pengukuran level II dihitung dari keaktifan Eselon II
 - Setditjen PRL menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon II.

Tabel 29. Capaian IKM Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%) Triwulan II Tahun 2024

SK.8		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut											
IK - 15		Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)											
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
100	116,67	116,67	94	100	106,38	-	94	106,38	94				

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024
 Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 adalah 100, Dit KKHL sudah memenuhi target sebesar 94%
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023
 Perbandingan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100 jika dibandingkan Triwulan II Tahun 2023 sebesar 100 atau sama dikarenakan pemenuhan keaktifan pejabat.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
 Belum ada perbandingan dengan target menengah KKP
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Renstra DJPRL
 Capaian kinerja Triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 100. Sedangkan target di Ditjen PKRL dinyatakan secara tahunan.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
 Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: (1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan, dan (2). Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial terkait dengan indikator kinerja "Persentase Unit Kerja Direktorat KKHL Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (%)".
 - b. Kendala
 Tidak terdapat kendala untuk memenuhi IK ini karena pemenuhan berdasarkan dari informasi pengetahuan pimpinan (direktur)
 - c. Solusi
 Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka

mencapai target yang ditetapkan, yaitu: mengingatkan peran aktif pimpinan dalam menginput informasi dan hal-hal terkait lainnya ke dalam aplikasi *portal.kkp.go.id*.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui keikutsertaan dan keaktifan para pejabat dan pelaksana terkait di Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan dalam menginput informasi kegiatan dan hal-hal terkait lainnya ke dalam aplikasi yang mudah digunakan yaitu aplikasi *portal* tanpa perlu mengeluarkan anggaran untuk mengadakan pelatihan.

7. Kegiatan Pendukung

Tidak ada kegiatan pendukung untuk mendukung IKU ini, karena pelaksanaannya menggunakan aplikasi portal *Collaboration Office*.

8. Realisasi Anggaran

Tidak ada penggunaan anggaran dalam IKU ini.

IKM 16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti Dit KKHL}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Dit KKHL}} \times 100$$

Keterangan:

1. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam sidak maka tindak lanjut rekomendasi **dihitung secara manual oleh Setditjen PRL**
2. Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian sama dengan nilai target.
3. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan **capaian 100 sehingga capaian pada kinerjaku 120%**.

Tabel 30. Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan Triwulan II Tahun 2024

SK.8		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut											
IK - 16		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)											
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
100	100	100	80	100	120	-	80	120	-	-	-	-	

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Target IK "Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat KKKHL Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan (%)" pada periode Triwulan I tahun 2024 adalah 100.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian kinerja Triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 100%. Sedangkan capaian indikator kinerja ini pada Triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 100%

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah karena pada Renstra KKP tidak terdapat IKU tersebut.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian IK ini pada Triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 100%. Sedangkan target di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada tahun berikutnya sebagai berikut: 70% (target tahun 2022), 75% (target tahun 2023), dan 80% (target tahun 2024). Indikator ini tidak terdapat di dalam Renstra DJPRL 2020-2024 tetapi berkontribusi terhadap penilaian Indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup DJPRL Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkap Dan Disampaikan.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Faktor yang mendorong Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan dapat mewujudkan capaian Indikator Kinerja (IK) ini, yaitu:

1. Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: (1). Adanya komitmen dan

kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.

2. Penyebab keberhasilan dari faktor eksternal, yaitu: adanya peran serta dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dalam membantu capaian target IK penilaian indikator kinerja "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat KKHL Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkap Dan Disampaikan (%)".

b. Kendala

Terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu : tidak seluruh staf di Dit. Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan mengetahui indikator ini.

c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapaitarget yang ditetapkan, yaitu: hasil pengawasan sebaiknya disampaikan kesetiap staf dan koordinator sebagai informasi dan Batasan dalam pelaksanaan kegiatan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

7. Kegiatan Pendukung

Tidak ada kegiatan pendukung

8. Realisasi Anggaran

Tidak ada realisasi anggaran untuk mendukung IKU ini

IKM 17. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu: (1). Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2). Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (3). Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4). Efektivitas sistem pengendalian intern.

Temuan LHP BPK Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Tahun 2024.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit KKHL yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit KKHL}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Contoh:

Target = 100

Tidak dilakukan audit oleh BPK, maka yang dituliskan capaian pada kinerjaku adalah 100

Tabel 31. Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (%) Triwulan II Tahun 2024

SK.8		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut											
IK - 17		Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (%)											
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	100	Perhitungan dilaksanakan Tahunan						100	-	-	-	-	

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024
 Capaian Triwulan II Dit KKHL belum ada info karena merupakan target tahunan. Untuk laporan pemeriksaan BPK tahun 2023 masih berjalan.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023
 Capaian kinerja Triwulan II tahun 2024 dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2023, karena IK ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun (secara tahunan)
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
 Tidak dapat dibandingkan

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Renstra DJPRL
Tidak dapat dibandingkan

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Penyebab keberhasilan, yaitu:

- 1) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan berupaya untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan, dan
- 2) Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial terkait dengan indikator kinerja "**Persentase Penyelesaian Temuan lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut**".

a. Kendala

Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja "**Persentase Penyelesaian Temuan lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut**", juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu temuan yang disampaikan dalam penyelesaiannya tidak melibatkan seluruh staf dan koordinator.

b. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu : Penyelesaian temuan harus melibatkan semua koordinator lingkup Dit. Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

-

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pencapaian kinerja ini dengan menindaklanjuti apa yang dibutuhkan BPK pada saat reviu dan sesudah reviu.

8. Realisasi Anggaran

Pada indikator ini tidak alokasi anggaran.

IKM 18. Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (nilai)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan

Teknik Menghitung:

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PRL akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PRL merupakan hasil dari kumulatif penilaian dari instrument-instrumen dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

a) Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen:

- Penciptaan Arsip
- Penggunaan Arsip
- Pemeliharaan Arsip
- Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

b) Sumberdaya Kearsipan

- Sumberdaya Manusia Kearsipan
- Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 32. Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi dan Keaneekaragaman Hayati Laut (nilai) Triwulan II Tahun 2024

SK.8		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Konservasi dan Keaneekaragaman Hayati Laut											
IK - 18		Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi dan Keaneekaragaman Hayati Laut (nilai)											
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	100	Perhitungan dilaksanakan Tahunan					100	-	-	-	-	-	-

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat capaian capaian pada Triwulan II Tahun 2024

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023
 Capaian Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023, karena tidak ada target triwulan dan penghitungan capaian IKU ini secara tahunan yaitu pada Triwulan IV Tahun 2024

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DJPKRL. Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Renstra DJPRL
Capaian kinerja Triwulan I 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis keberhasilan:
Koordinasi kearsipan telah terbentuk dengan dilakukannya tim arsip yang sudah di SK-kan di Tingkat Kementerian dan penugasan di lingkup Ditjen PKRL. Komunikasi juga dilakukan via group WA yang berjalan aktif.
 - b. Kendala
Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu : tidak seluruh staf di Dit. Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan mengetahui indikator ini.
 - c. Solusi
Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapaitarget yang ditetapkan, yaitu: hasil pengawasan kearsipan sebaiknya disampaikan kesetiap staf dan koordinator sebagai informasi.
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Direktorat KKHL/KEBP memiliki sumberdaya manusia arsiparis sebanyak 2 orang, yaitu arsiparis ahli pertama dan terampil.
7. Kegiatan Pendukung
Tidak ada kegiatan pendukung
8. Realisasi Anggaran
Tidak ada realisasi anggaran untuk mendukung IKU ini

Realisasi Anggaran

Direktorat KEBP pada tahun 2024 memperoleh anggaran sebesar Rp. 26.641.306.000, realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 7.272.379.708 (27,30%)

Tabel 33. Realisasi anggaran Dit KKHL triwulan II tahun 2024

kode	uraian	jumlah	Realisasi	Persentase
032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup			
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	26,641,326,000	5,074,058,731	19.05
2362.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	11,609,506,000	1,898,145,415	16.35
2362.PBW.001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	11,309,506,000	1,760,300,805	15.56
051	Partisipasi Pembahasan dan Negosiasi Konvensi Keanekaragaman Hayati Laut	1,101,500,000	217,869,170	19.78
A	Evaluasi Implementasi Konvensi Konservasi Kawasan	881,500,000	217,869,170	24.72
B	Penyusunan Kertas Posisi dan/atau Laporan Konvensi Konservasi	220,000,000	11,222,000	5.10
052	Implementasi Resolusi Konvensi Keanekaragaman Hayati Laut	698,500,000	174,458,296	24.98
A	Diseminasi Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	698,500,000	174,458,296	24.98
053	Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	771,000,000	23,403,972	3.04
A	Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	771,000,000	23,403,972	3.04
054	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi	651,200,000	206,442,782	31.70
A	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi	651,200,000	206,442,782	31.70
055	Data dan Informasi Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	761,860,000	111,735,697	14.67
A	Sistem Monitoring dan Pelaporan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Website	301,860,000	95,315,697	31.58
B	Tata Kelola Lalu Lintas Pelayaran dan Peta Laut di Kawasan Konservasi	200,000,000	16,420,000	8.21
C	Konsultasi Publik Kawasan	260,000,000		-
D	Verifikasi PKKPR			
056	Pengembangan Pemanfaatan Potensi Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1,152,563,000	380,376,723	33.00
A	Pembinaan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	474,256,000	237,236,923	50.02
B	Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi-PNBP	678,307,000	143,139,800	21.10
057	Pengembangan Sistem Perizinan Terintegrasi	496,505,000	53,845,350	10.84
A	Pemeliharaan SEAPARK	100,000,000	34,615,350	34.62
B	Pengembangan SEAPARK-PNBP	396,505,000	19,230,000	4.85

058	Pelayanan Perizinan Berusaha Kawasan Konservasi	300,932,000	54,822,796	18.22
A	<i>Pelayanan Perizinan Berusaha Kawasan Konservasi</i>	300,932,000	54,822,796	18.22
060	Data dan Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	426,306,000	168,023,846	39.41
A	<i>Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah</i>	426,306,000	168,023,846	39.41
061	Pemulihan Populasi dan/atau Paengayaan Stock Jenis Ikan	498,200,000	77,036,940	15.46
A	<i>Pemulihan Populasi dan/atau Paengayaan Stok Jenis Ikan</i>	498,200,000	77,036,940	15.46
062	Penanganan Biota Dilindungi/Terancam Punah	400,000,000	12,430,000	3.11
A	<i>Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah</i>	400,000,000	12,430,000	3.11
063	Edukasi dan Sosialisasi Kehati Perairan Dilindungi/terancam Punah	700,000,000	218,038,276	31.15
A	<i>Edukasi dan Sosialisasi Perlindungan Keanekaragaman Hayati Perairan</i>	700,000,000	218,038,276	31.15
064	Pengelolaan Efektif Keanekaragaman Hayati Perairan	300,000,000	61,816,957	20.61
A	<i>Evaluasi Keanekaragaman Hayati Perairan Dilindungi/Terancam Punah</i>	300,000,000	61,816,957	20.61
066	Ocean Account	2,600,940,000	848,129,151	32.61
A	<i>Penyusunan Neraca Sumber Daya Laut</i>	440,060,000	259,800,039	59.04
B	<i>Analisis Nilai Sumberdaya</i>	882,000,000	405,531,262	45.98
C	<i>Penyusunan Neraca Karbon-PNBP</i>	683,000,000	90,739,945	13.29
D	<i>Penyusunan Tabel Andalusia-PNBP</i>	395,500,000	92,057,905	23.28
E	<i>Pembentukan Badan Layanan Umum</i>	200,380,000		-
067	Bimbingan Teknis Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan	450,000,000	60,025,553	13.34
A	<i>Bimtek Perlindungan dan Pelestarian Jenis</i>	200,000,000	60,025,553	30.01
B	<i>Bimtek Perlindungan dan Pelestarian Jenis-PNBP</i>	250,000,000		-
2362.PBW.002	Rekomendasi Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	300,000,000	137,844,610	45.95
051	Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	300,000,000	137,844,610	45.95
A	<i>Rekomendasi Penetapan Kawasan Konservasi</i>	300,000,000	137,844,610	45.95
2362.PEC.001	Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati	380,000,000	175,591,047	46.21
051	Penyusunan Kesepakatan Bersama	380,000,000	175,591,047	46.21
A	<i>Pembentukan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi</i>	380,000,000	175,591,047	46.21
2362.PEE.001	Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	465,000,000	153,713,278	33.06
051	Inisiasi Jejaring dan Kemitraan	465,000,000	153,713,278	33.06
A	<i>Pembentukan Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi</i>	202,800,000	43,892,730	21.64
B	<i>Pembentukan Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi</i>	262,200,000	109,820,548	41.88
2362.PFA.001	Dokumen NSPK Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	3,150,000,000	826,422,757	26.24
051	NSPK Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pualu- Pulau Kecil	400,000,000	113,031,843	28.26
A	<i>Penyusunan dan Pelaksanaan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi</i>	400,000,000	113,031,843	28.26
052	NSPK Pemanfaatan Kawasan Konservasi	1,000,000,000	311,006,004	31.10
A	<i>Penyusunan Materi Muatan Terkait Pemanfaatan Kawasan Konservasi</i>	700,000,000	254,218,004	36.32
B	<i>Bimtek Pemanfaatan Kawasan Konservasi-PNBP</i>	300,000,000	56,788,000	18.93
055	NSPK Perlindungan /Pelestarian Keanekaragaman Hayati Perairan	800,000,000	168,724,357	21.09
A	<i>Penyusunan NSPK Perlindungan/Pelestarian Keanekaragaman Hayati Perairan</i>	800,000,000	168,724,357	21.09

056	Penyiapan NSPK dalam rangka pemanfaatan Jenis Ikan Appendiks CITES dan /atau Jenis Ikan Dilindungi	600,000,000	228,449,053	38.07
A	Penyusunan NSPK Pemanfaatan Jenis Ikan	300,000,000	150,024,464	50.01
B	Penyusunan NSPK Pemanfaatan Jenis Ikan-PNBP	300,000,000	78,424,589	26.14
057	NSPK Pembahasan Juknis KOMPAK	350,000,000	5,211,500	1.49
A	Pembahasan NSPK	350,000,000	5,211,500	1.49
2362.QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat [base line]	625,000,000	377,603,652	60.42
2362.QEH.001	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	625,000,000	377,603,652	60.42
052	Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK	97,500,000	32,098,630	32.92
A	Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK	97,500,000	32,098,630	32.92
053	Pendampingan dan Pembinaan KOMPAK	527,500,000	345,505,022	65.50
A	Pendampingan dan Pembinaan KOMPAK	527,500,000	345,505,022	65.50
B	AWARD KOMPAK			
2362.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem [5,550,000,000	55,688,950	1.00
2362.REA.002	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Operasional	450,000,000	55,688,950	12.38
054	Pelayanan Perizinan Kawasan Konservasi	450,000,000	55,688,950	12.38
A	Dukungan Pelayanan Perizinan	297,512,000	32,400,000	10.89
B	Pelayanan Perizinan-PNBP	152,488,000	23,288,950	15.27
2362.REA.004	Oceans for Prosperity Project - Lautra	5,100,000,000	-	-
051	Infrastruktur dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan	3,100,000,000	-	-
AA	Ocean Monitoring System-PHLN	1,093,640,000		-
AB	E-PANJI Assesment Software-PHLN	906,360,000		-
AC	Hibah	100,000,000		-
BA	Rekomendasi Pengendalian Perubahan Iklim sektor Kelautan dan Perikanan	1,000,000,000		-
052	Perluasan Peluang Ekonomi di dalam dan sekitar Kawasan Konservasi	1,000,000,000	-	-
A	Koordinasi Fasilitas Pembangunan Infrastruktur LAUTRA-PHLN	390,760,000		-
AB	Fasilitas Pembangunan Sarana/Prasarana LAUTRA-PHLN	609,240,000		-
053	Manajemen Proyek	1,000,000,000	-	-
A	Workshop Nasional Oceans for Prosperity Project - LAUTRA -PHLN	600,000,000		-
B	Sosialisasi dan Publikasi Oceans for Prosperity Project LAUTRA-PHLN	400,000,000		-
2362.REB	Konservasi Jenis/Spesies [Base Line]	4,861,820,000	1,586,893,632	32.64
2362.REB.002	Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola Pemanfaatannya Secara berkelanjutan	4,861,820,000	1,586,893,632	32.64
051	Penyediaan Data Potensi dan Status Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	387,920,000	47,758,216	12.31
A	Penyediaan Data Potensi dan Status Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	250,000,000	29,913,000	11.97
B	Penyediaan Data Potensi dan Status Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES-PNBP	137,920,000	17,845,216	12.94

052	Pelayanan peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES	4,473,900,000	1,539,135,416	34.40
A	Sosialisasi perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Appendiks CITES dan/atau Jenis Ikan Dilindungi	811,000,000	391,688,284	48.30
B	Pengembangan Layanan Pemanfaatan E-SAJI-PNBP	371,483,000	36,681,750	9.87
C	Dukungan Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Jenis Ikan-PNBP	2,600,757,000	897,126,024	34.49
D	Peningkatan Kompetensi Petugas Perizinan dan Penerbitan Dokumen Pengangkutan atas Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES-PNBP	404,010,000	150,952,668	37.36
E	Penyusunan NDF Jenis Ikan Appendiks CITES - PNBP	286,650,000	62,686,690	21.87
Tata Usaha		2,800,000,000	1,278,944,273	45.68
2367.EBA. 994	Operasional Kantor dan Pemeliharaan	1,200,000,000	493,854,284	41.15
2367.EBA.962	Layanan Umum	1,325,000,000	785,089,989	59.25
'051	Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	1,325,000,000	785,089,989	59.25
DA	Penyelenggaraan Operasional dan Administrasi Dit. KKHL	124,620,000	70,900,170	56.89
DB	Peningkatan Kompetensi Pegawai dan Organisasi Jiwa Korsia Pegawai	234,140,000	230,727,249	98.54
DD	Pelaksanaan Kinerja Penatausahaan	62,940,000	37,134,275	59.00
DE	Pelaksanaan Keuangan dan perbendaharaan	62,940,000	24,941,812	39.63
DF	Pelaksanaan Penataan Aset BMN dan Persediaan	130,980,000	58,675,000	44.80
DG	Pelaksanaan Perencanaan, Program, dan Monev Pelaporan	94,380,000	68,292,280	72.36
DH	Sosialisasi Kebijakan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Tahun 2024	615,000,000	294,419,203	47.87
2367.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	275,000,000	-	-
051	Perangkat Pengolah Data dan Informasi Lingkup Satker Pusat Ditjen PRL	275,000,000	-	-
K	Peralatan Penunjang Kegiatan Dit. KKHL	275,000,000	-	-

BAB IV PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Dit. KEBP) Triwulan II Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis Dit. KKHL sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Direktorat KEBP tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan yaitu pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Adapun capaian yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2024 Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan. LKj ini juga memberikan deskripsi tentang karakter Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Mandatory (IKM), capaian target masing-masing IKU maupun IKM khususnya periode Triwulan II tahun 2024, faktor keberhasilan, faktor hambatan atau masalah, serta solusi untuk mengatasi hambatan atau masalah tersebut.
2. Capaian Kinerja (IKU dan IKM) periode Triwulan II tahun 2024 Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan berdasarkan aplikasi online kinerjaku.kkp.go.id adalah sebesar 115,46 % dengan status berwarna biru.
3. Pagu anggaran yang bisa digunakan dalam pelaksanaan capaian kinerja organisasi adalah Rp 26.641.306.000,- (dua puluh enam milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam rupiah).
4. Pada Triwulan II tahun 2024 indikator kinerja yang sudah ada capaiannya yaitu :
 - IKU Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diverifikasi target sebesar 5 Kelompok dan capaian sebesar 17 kelompok.
 - IKM Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut target sebesar 18% dan capaian sebesar 27,30%.
 - IKM Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut target sebesar 83 dan capaian sebesar 86,79.
 - Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut target sebesar 2 dokumen dan capaian sebesar 2 dokumen.
 - Persentase unit kerja lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar target sebesar 94% dan capaian sebesar 100%
 - Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan target sebesar 80% dan capaian sebesar 100%

1.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang diajukan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, meningkatkan kinerja organisasi, dan mengantisipasi faktor hambatan atau masalah yang dihadapi atau mungkin akan dihadapi pada periode berikutnya, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan ketua tim kerja terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan agar tepat waktu dalam pemenuhan dokumen.
2. Melakukan pertemuan dengan para ketua tim kerja lingkup Dit KEBP terkait percepatan pertanggungjawaban keuangan dan monitoring capaian IKU realisasi keuangan.

1.3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya

Beberapa rekomendasi dan tindak lanjut yang dilakukan Direktorat KEBP dalam pencapaian kinerja organisasi antara lain:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
1	Mengupayakan ketersediaan data dan informasi untuk menunjang capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) yang ditetapkan pada tahun 2024	a) Melaksanakan rapat monitoring capaian IKU dan realisasi anggaran TA 2024 yang diikuti oleh seluruh Ketua Tim Kerja, JFT APJK/PELP Direktorat KEBP Tanggal 5 Juni 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1T4BuwwS7EyzFCTmjuxUH-WFpqEDg6C5I
2	Melakukan koordinasi lebih intensif dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) serta menyamakan sudut pandang (point of view) mengenai substansi tertentu dari para pemangku kepentingan terkait (stakeholders) tersebut sehingga berdampak kepada pencapaian target sesuai dengan waktu yang ditetapkan	a) Asistensi Teknis dan Sosialisasi Penetapan Kawasan Konservasi di DKP Provinsi Gorontalo Tanggal 17 Mei 2024 b) Asistensi Teknis dan Sosialisasi Penetapan Kawasan Konservasi di DKP Provinsi Bali Tanggal 28 Juni 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1T4BuwwS7EyzFCTmjuxUH-WFpqEDg6C5I

Lampiran

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja PK Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenpri@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

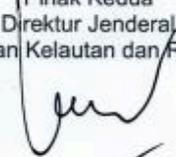
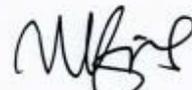
Nama : **Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan**
Jabatan : **Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**
Jabatan : **Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua Direktur Jenderal, Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Pihak Pertama Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
	
Victor Gustaaf Manoppo	Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	1.	Nilai PNBP Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (Rp.000)	15.768.317
2.	Terwujudnya Penambahan Luas dan Kawasan konservasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Nasional dan/atau Daerah	2.	Luas Kawasan Konservasi Baru yang dicadangkan (Ribu Ha)	200
		3.	Luas Kawasan Konservasi yang Ditetapkan (Juta Ha)	2
3.	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Berkelanjutan	4.	Luas Kawasan Konservasi yang Operasional (Juta Ha)	17,8
		5.	Luas Kawasan Konservasi yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan (Juta Ha)	17,8
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif	6.	Rekomendasi Konvensi Internasional yang Disepakati dan Ditindaklanjuti (Dokumen)	6
		7.	Kesepakatan Jejaring, Kemitraan, dan Kerjasama Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut yang Disepakati (Kesepakatan)	5
5.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi	8.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diverifikasi (Kelompok)	20
6.	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan	9.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau Dilindungi dan/atau Dilestarikan yang Meningkatkan Pengelolaannya (Jenis)	20
7.	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan	10.	Jenis Keanekaragaman Hayati yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang Dikelola Pemanfaatannya secara Berkelanjutan (Jenis)	7

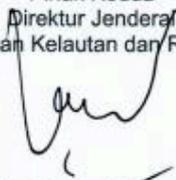
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
8.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	11. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (%)	95
		12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (Indeks)	88
		13. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (Nilai)	81
		14. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (Dokumen)	4
		15. Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
		17. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (%)	100
		18. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (nilai)	75

Data Anggaran

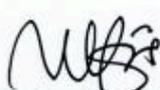
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	23.841.306.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	2.800.000.000
Total Anggaran Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Tahun 2024		26.641.306.000

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Direktur Konservasi dan
Keanekaragaman Hayati Laut


Muh. Firdaus Agung Kunto
Kurniawan

Progres Penetapan Kawasan Konservasi hingga Triwulan II 2024

No	Penetapan	Lokasi	Provinsi	Luas (Ha)
1	Kepmen KP Nomor 12 Tahun 2024	Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Muara Badak Dan Marangkayu Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	3.985,21
2	Kepmen KP Nomor 34 Tahun 2024	Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Kayuadi	Sulawesi Selatan	6.899,43
3	Kepmen KP Nomor 35 Tahun 2024	Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Pulau Panikiang	Sulawesi Selatan	496,8
4	Kepmen KP Nomor 36 Tahun 2024	Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Pasi Gusung	Sulawesi Selatan	1.769,73
5	Kepmen KP Nomor 37 Tahun 2024	Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Pulau Salahnama	Sumatera Utara	3.806,14
6	Kepmen KP Nomor 38 Tahun 2024	Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Betahwalang	Jawa Tengah	244,88
Total Luas				17.202,19